



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA

Jalan Ir. Soekarno No. 58 Kel. Muara Jawa Ulu Telepon +62541692000
website www.muarajawa.id email kecmuarajawa2020@gmail.com Kodepos 75261

Muara Jawa, 16 Juli 2025

Nomor : B-0275/SET.CMJ.KEU/400/07/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pengelolaan Risiko Triwulan II Tahun 2025

Yth. Bupati Kutai Kartanegara
di-

Tenggarong

Berkenaan dengan telah selesainya penyusunan Laporan Pengelolaan Risiko Triwulan II pada Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, terkait hal tersebut dengan hormat disampaikan laporan dimaksud sebagaimana dokumen terlampir.

Demikian disampaikan dan terimakasih.



Camat

MUHAMMAD RAMLI, S.E., M.M.

Pembina, IV/a

NIP 197506042000121003

Tembusan Kepda Yth

1. Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di Tempat
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Selaku Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di Tempat
3. Inspektorat selaku Unit Pengawasan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di Tempat.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA

Jalan Ir. Soekarno No. 58 Kel. Muara Jawa Ulu Telepon +62541692000
website www.muarajawa.id email kecmuarajawa2020@gmail.com Kodepos 75261

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
UNIT PENGELOLA RISIKO ESELON III
CAMAT MUARA JAWA
TRIWULAN II TAHUN 2025**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Pelaporan Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada pasal 22 ayat (1) “Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko”. Ayat (2) Laporan Pengelolaan Risiko pada ayat (1) meliputi a. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko; b. Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; Selanjutnya ayat (6) Laporan berkala pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b. dilakukan secara triwulan dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan. Selanjutnya ayat (7) “Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan tingkat perangkat daerah dan tingkat operasional dikoordinasikan oleh tingkat pejabat pimpinan tinggi.



Selanjutnya dalam lampiran III, Kegiatan pelaporan dilakukan pada tingkat perangkat daerah yaitu laporan risiko dan pelaksanaan RTP pada tingkat strategis (entitas perangkat daerah) dan operasional yang ditangani perangkat daerah triwulan, tahunan, serta laporan evaluasi pelaksanaan dan rekomendasi perbaikan kegiatan pengendalian setiap triwulan dan tahunan.

Dalam mewujudkan pelaksanaan pelaporan tersebut, Camat Muara Jawa sebagai UPR eselon III berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Strategis dan Operasional yang telah dilaksanakan kepada Bupati Kutai Kartanegara.

1.2 Tujuan Pelaporan Pengelolaan Risiko:

Tujuan pelaporan Pelaporan Pengelolaan Risiko pada Camat Muara Jawa sebagai berikut :

1. Memberikan informasi hasil identifikasi, analisis dan rencana tindak pengendalian Risiko, (RTP) Risiko program dan kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah tahun pada Triwulan II Bulan April sampai dengan Juni 2025.
2. Memberikan informasi kejadian risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang telah dilaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan
3. Memberikan informasi tentang tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko sebagai indikator peringatan dini dan sebagai bahan data base keterjadian risiko.
4. Memberikan informasi mengenai kendala/hambatan pelaksanaan pengendalian risiko dan risiko sisa setelah pelaksanaan pengendalian risiko.
5. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penanganan risiko lebih lanjut atas kejadian risiko sisa (*residual Risk*).

BAB II PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

2.1 Unit Pemilik Risiko Esselon III

Unit Pemilik Risiko : Camat Muara Jawa.

Pelaksana Pengelolaan Risiko pada Unit Pemilik Risiko Camat Muara Jawa sebagai berikut :

Tabel

Pelaksana Pengelolaan UPR Esselon IV Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Jabatan	Nama/NIP	Jabatan Dalam UPR
1	Camat Muara Jawa	Muhammad Ramli,SE,MM Nip.197506042000121003	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Camat	Edy Kasianto S,S.Pd Nip. 19730112 1998021001	Ketua
3	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Nila Irmawati,S.Mn NIP. 197608042003122007	Unit Pemilik Risiko Eselon IV merangkap Asesor 1
4	Kepala Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Akmidatul Muslimah,S.Akun Nip. 198808192011012002	Unit Pemilik Risiko Eselon IV merangkap Asesor 2
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Rohana, S.Sos Nip. 196707121986022001	Unit Pemilik Risiko Eselon IV
6	Kepala Seksi Pemerintahan	Syamsul Bahri,SE Nip. 197912092001121005	Unit Pemilik Risiko Eselon IV
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dina Mariana,SE,MM Nip. 198401102010012001	Unit Pemilik Risiko Eselon IV
8	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Ruli Hambrani,S.Ag,MM Nip. 197411042007011023	Unit Pemilik Risiko Eselon IV
9	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Hj. Norjanah,S.Sos Nip. 197006142000122004	Unit Pemilik Risiko Eselon IV
10	Penelaah Tehnis Kebijakan	Ifni Hanifah Gani,S.Sos NIP. 198005152007012039	Unit Pemilik Risiko PPTK merangkap Asesor 3
11	Penelaah Tehnis Kebijakan	Hatmah,S.IP NIP. 198105102007012022	Unit Pemilik Risiko PPTK
12	Penata Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	Suryani,S.IP NIP. 198106172007012010	Unit Pemilik Risiko PPTK



Tugas Pelaksana Unit Pemilik Risiko (UPR) adalah :

- 1) melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (*risk assessment*) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang adadi unit kerja masing-masing.
- 2) melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- 3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang.
- 4) Menyusun hasil penilaian Risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- 5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.
- 6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- 7)

2.2. Pengendalian Intern

Dalam pelaksanaan pengelolaan Risiko Kecamatan Muara Jawa disusun Kriteria Efektivitas Pengendalian Intern pada Standar Operasional Prosedur untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan kriteria sebagai berikut;

a. Kriteria Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Tabel
Kriteria Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Deskripsi	Kriteria		Keefektifan
	Desain	Operasional	
Kontrol bersifat preventif, dapat dioperasikan dan dilaksanakan secara konsisten. Perlu dipantau karena terpengaruh perubahan kondisi	Ya	Ya	Efektif
Kontrol mencakup sebagian dari kebutuhan. Jika desain bagus operasional sebagian	Ya Tidak	Tidak Ya	Sebagian efektif
Baik desain maupun operasional dari kontrol yang ada tidak memadai. Perlu didesain ulang untuk perbaikan atau ganti baru.	Tidak	Tidak	Tidak efektif.



b. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri 3 komponen, yaitu skala kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko, skala dampak risiko, dan skala tingkat risiko (nilai risiko).

c. Skala Kemungkinan (Probabilitas) Risiko

Tabel
Skala Kemungkinan (Probabilitas) Risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/Sangat sering	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan besar	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51 – 70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan sedang	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sedang (sebesar 31 – 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sampai dengan 3 kali dalam 5 Tahun)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 – 10% atau 1 kali dalam 5 Tahun)



d. Skala Dampak Risiko

Tabel
Skala Dampak Risiko

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara	Penurunan Reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan	Tuntutan Hukum
Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian negara ≤ Rp1 Juta	Keluhan <i>Stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	Jumlah tuntutan hukum ≤ 5 kali dalam
Minor (2)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp1 Juta s.d Rp5 Juta	Keluhan <i>Stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke organisasi	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 kali
Moderat (3)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp5	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 kali
Signifikan (4)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp10 Juta s.d	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali s.d 50 kali
Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp.50	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja ≤ 25%	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali

e. Skala Penerimaan Risiko

Tabel
Skala Nilai Penerimaan Risiko

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko (<i>Risk Appetite</i>)
1-2 (Sangat Rendah)	Dapat diterima
3-4 (Rendah)	Dapat diterima
6-9 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12-16 (Sangat Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik
20-25 (Dahsyat)	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik



f. Kriteria Tingkat (level) Risiko

Gambar
Matriks Tingkat Risiko

Matriks Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Dampak					



Pengelompokan Prioritas Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel
Pengelompokan prioritas Tingkat
Risiko

Skala	Warna	Tingkat	Prioritas
1 -5	Hijau	Sangat Rendah	5
6 – 8	Hijau Muda	Rendah	4
9 – 12	Kuning	Sedang	3
15 – 20	Jingga	Tinggi	2
20 - 25	Merah	Sangat Tinggi	1

g. Kriteria Tingkat Risiko Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel
Pemetaan Tingkat Risiko, selera Risiko, Toleransi Risiko dan Eskalasi Tindakan

Tingkat Risiko	Selera Risiko	Toleransi Risiko	Tindakan Eskalasi
Sangat Tinggi	Risiko tidak diterima dan dilakukan pengendalian terutama tindakan responsif dapat perlu	Risiko tidak dapat Diterima dan ditoleransi dan Perlakuan risiko perlu dikaji ulang	Perlu perhatian Dewan Pengawas organisasi dan Pengendalian dapat dieskalasi kepemimpinan organisasi dan didukung dengan rencana penanganan terinci
Tinggi	Risiko tidak dapat diterima dan perlu dilakukan pengendalian baik preventif maupun responsif.	untuk perbaikan atau penambahan perlakuan atau ganti yang baru.	Perlu perhatian pimpinan organisasi, pengendalian eskalasi kepemimpinan manajemen senior organisasi dan didukung rencana rinci
Sedang tinggi	Risiko tidak dapat diterima dan perlu dilakukan pengendalian terutama tindakan preventif.		Pengendalian dieskalasi ke manajer senior selaku pemilik risiko dan didukung dengan rencana rinci.
Sedang rendah	Risiko tidak dapat diterima, namun perlakuan pengendalian hanya dilakukan jika manfaat yang diterima lebih besar dari biayanya	Risiko tidak dapat diterima tapi dapat ditoleransi sepanjang secara praktek menguntungkan.	Pengendalian cukup dengan Manajer Bidang sesuai dengan kebijakan dan SOP yang berlaku.



Rendah		Risiko dapat diterima sehingga tidak perlu perlakuan, cukup kontrol yang ada, tapi perlu dimonitor oleh pemilik risiko.	Risiko dapat diterima dan ditoleransi sehingga tidak perlu perlakuan, cukup dengan kontrol yang ada dan dimonitor oleh pemilik risiko.	Pertahankan pengendalian yang ada dan monitor tingkat keterjadian risiko untuk perlakuan risiko.
--------	--	---	--	--



BAB III HASIL PENILAIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO

3.1.1 Unit Pengelola Risiko (UPR) Esselon III

3.1.2 Camat Muara Jawa

NAMA PEJABAT : MUHAMMAD RAMLI,SE,MM.

NIP : 197506042000121003

a. Program dan kegiatan yang dikelola sesuai Tabel berikut:

Tabel
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Anggaran

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65 Nilai	24.170.301.299
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36 dokumen	605.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	14 laporan	15.449.312.901
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	1017 unit	280.200.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian	74 Orang	705.511.992
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 jenis	1.557.620.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	80 Persen	772.400.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	3.607.306.406
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	230 unit	1.192.950.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	85 Persen	40.359.650.000
		Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	87,5 Persen	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	450.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2 Kegiatan	39.909.650.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100 Persen	21.987.000.000



Kecamatan Muara Jawa
Laporan Unit Pengelolaan Risiko Triwulan II Tahun 2025

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	25 Kegiatan	7.930.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	348 Lembaga	14.057.000.000
7.01.03	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100 Persen	175.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	175.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	612.701.502
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1 Kegiatan	612.701.502
JUMLAH				87.304.652.801



b. Hasil Identifikasi Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut:

Tabel
Hasil identifikasi Risiko Program dan Kegiatan

No.	Nama Kegiatan /Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan/Uraian Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RP MJ 01	Tidak Lengkapnya Data Pendukung Yang Digunakan Dalam Penilaian SAKIP	kurangnya pemahaman pengampu dalam memenuhi data pendukung	Internal	Control	Target Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tidak Sesuai	CAMAT
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RK MJ 01	Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Terlambat Dibuat	Tidak Lengkapnya Data Yang Dibutuhkan	Internal	C	Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Dibuat Tidak Valid	CAMAT
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Muara Jawa)	RSK MJ 01	Data rincian kebutuhan dan anggaran (Sub Kegiatan) yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah belum tersusun dengan optimal	Pejabat Pelaksana belum mengidentifikasi kebutuhan Barang /Jasa dan anggaran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya	Internal	C	Dokumen Perencanaan tidak dapat tersusun secara tepat waktu	CAMAT
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kecamatan Muara Jawa)	RSK MJ 02	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran terhambat karena Aplikasi dan sistem kadang terganggu pada saat login Aplikasi	Jaringan telekomunikasi kurang stabil	Eksternal	UC	Penyusunan dokumen pelaksanaan tidak tepat waktu	CAMAT
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Kecamatan Muara Jawa)	RSK MJ 03	Dokumen Perubahan tidak dapat tersaji secara tepat waktu karena keterbatasan waktu penyusunan Dokumen	Terbatasnya waktu yang diberikan dalam penyusunan Dokumen Anggaran Perubahan SKPD	Eksternal	UC	Penyusunan dokumen pelaksanaan perubahan tidak tepat waktu	CAMAT



1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Muara Jawa)	RSK MJ 04	Data Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja terlambat disampaikan Pejabat Pelaksana kepada Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	Pelaksana kegiatan tidak membuat laporan progres capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan	Internal	C	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja tidak tepat waktu	CAMAT
1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSK MJ 05	Data capaian kinerja terlambat disampaikan oleh Pejabat Pelaksana kepada Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	Pelaksana kegiatan tidak membuat laporan progres capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan	Internal	C	Penyusunan Laporan Evaluasi Perangkat Daerah tidak tepat waktu	CAMAT
1.6	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	RSK MJ 06	Data Statistik Sektoral yang disampaikan tidak relevan	Pelaksana kegiatan tidak memahami cara mengumpulkan dan menyampaikan data	Internal	C	Pengisian BECIK dan Satu Data Indonesia tidak akurat	CAMAT
1.7	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSK MJ 07	Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tidak dihadiri	Internal	C	Tidak tertampungnya usulan-usulan Kecamatan oleh OPD Kabupaten	CAMAT
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RK MJ 02	Dokumen Administrasi Keuangan Yang Dibuat Tidak Valid	Tidak Lengkapnya Data Yang Dibutuhkan	Internal	C	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tidak akuntabel	CAMAT
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSK MJ 08	Kurangnya anggaran gaji dan tunjangan	1. Perubahan nilai gaji karena Berubahnya data pegawai baik karena kenaikan pangkat/KGB/bertambahnya anggota keluarga yang ditunjang; 2. Ketidaktepatan dalam menyusun skema anggaran kas bulanan; 3. Perubahan peraturan dasar dalam perhitungan gaji/BPJS/Pajak penghasilan	Internal	C	Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan tidak tepat waktu	CAMAT



2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSK MJ 09	Belum sinkronnya data Keuangan dan Aset pada saat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak melaksanakan rekonsiliasi data barang dan data keuangan secara rutin	Internal	C	Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlambat (Tidak Tepat Waktu)	CAMAT
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	RSK MJ 10	Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran belum disusun sesuai dengan realisasi pelaksanaan kegiatan	Pelaksana kegiatan belum membuat rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan	Internal	C	Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulan/semesteran tidak tepat waktu	CAMAT
2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RSK MJ 11	Belum sinkronnya data Keuangan dan Aset pada saat Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Semester 1 dan Prognosis Semester 2	Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak melaksanakan rekonsiliasi data barang dan data keuangan secara rutin	Internal	C	Penyampaian Dokumen Realisasi Anggaran Semester 1 dan Prognosis Semester 2 Terlambat (Tidak Tepat Waktu)	CAMAT
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	RK MJ 03	Barang Milik Daerah Tidak Teradministrasi Dengan Lengkap	Tidak Lengkapnya Dokumen Pengadaan dan Dokumen Pendukung	Internal	Control	Pencatatan BMD Tidak Akurat	CAMAT
3,1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	RSK MJ 12	Perkiraan Kebutuhan yang Tidak Akurat	Penyusunan kebutuhan barang tidak berdasarkan data yang akurat dan analisis yang cermat	Internal	Control	Kebutuhan barang tidak terpenuhi / tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya	CAMAT
3,2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	RSK MJ 13	Pengurus barang tidak mendokumentasikan dan menginput hasil pelaksanaan PBJ kedalam sistem aplikasi SIMDA	Pengurus barang tidak memperoleh data secara rinci yang diperlukan dalam pencatatan dan pendokumentasian dari pelaksana PBJ	Internal	C	Laporan Barang Milik Daerah dan Laporan Keuangan tidak akuntabel	CAMAT



3,3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	RSK MJ 14	Barang Milik Daerah tidak dapat diketahui nilai wajarnya	Banyak BMD yang umur barang yang sudah melebihi umur ekonomisnya, kerusakan, atau karena alasan force majeure (kecelakaan atau kejadian tak terduga) namun masih tercatat di neraca SKPD dengan nilai yang tinggi	External	C	Nilai BMD di neraca tidak sesuai kondisi riil	CAMAT
3,4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Kecamatan Muara Jawa)	RSK MJ 15	Data barang milik daerah dengan fisik barang yang ada tidak sesuai	Pengurus barang kurang teliti dan cermat dalam memeriksa barang hasil pengadaan yang dilaksanakan oleh Ppkom ketika barang diserahkan	Internal	C	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah tidak akuntabel	CAMAT
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RK MJ 04	Data Pegawai Tidak Teradministrasi Dengan Lengkap	Masih terdapat beberapa Pegawai yang belum menginput data kepegawaian di Aplikasi SIMPEG	Internal	C	pelayanan Administrasi Kepegawaian tidak maksimal	CAMAT
4,1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	RSK MJ 16	Keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang	Proses pemilihan penyedia barang yang terlambat dilaksanakan	Internal	C	Kegiatan Tidak bisa Dilaksanakan sesuai Rencana	CAMAT
4,2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSK MJ 17	Pendidikan dan Pelatihan tidak terlaksana	Kesulitan dalam pemenuhan materi dan narasumber yang kompeten	Internal	C	Core Value ASN tidak mencapai Target Kinerja	CAMAT
4,3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	RSK MJ 18	Kurangnya Sosialisasi Peraturan Perundangan undangan	Minimnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan	Internal	C	Laporannya jadi tidak sesuai yang diharapkan	CAMAT
4,4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	RSK MJ 19	Kurangnya Implementasi peraturan perundang-undangan ASN	Kurang pemahaman terakut Peraturan Perundang-undangan	Internal	C	Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan ASN tidak berjalan dengan baik	CAMAT



5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RK MJ 05	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tidak sesuai kebutuhan	Kurangnya Sumber Daya Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Internal	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah tidak terlaksana secara maksimal	CAMAT
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RSK MJ 20	Aliran listrik mengalami gangguan	Instalasi listrik bermasalah	Internal	C	Terganggunya pekerjaan administrasi perkantoran	CAMAT
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSK MJ 21	Penyediaan ATK tidak tepat waktu	Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	Internal	C	Terganggunya pekerjaan administrasi perkantoran	CAMAT
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	RSK MJ 22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tidak tepat waktu	Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	Internal	C	Terganggunya pekerjaan administrasi perkantoran	CAMAT
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RSK MJ 23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu	Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	Eksternal	UC	Terganggunya pekerjaan administrasi perkantoran	CAMAT
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	RSK MJ 24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tidak tepat waktu	Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	External	C	Terganggunya pekerjaan administrasi perkantoran	CAMAT
5.6	Penyediaan Bahan/Material	RSK MJ 25	Penyediaan Bahan/Material tidak tepat waktu	Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	External	C	Terganggunya pekerjaan administrasi perkantoran	CAMAT
5.7	Fasilitasi kunjungan tamu	RSK MJ 26	Kunjungan tamu tidak dapat difasilitasi tepat waktu	Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	External	C	Terganggunya pekerjaan administrasi perkantoran	CAMAT



5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSK MJ 27	Pembayaran biaya perjalanan dinas tidak dapat dibayarkan tepat waktu	Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	External	C	Terganggunya pekerjaan administrasi perkantoran	CAMAT
5.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	RSK MJ 28	Barang-barang yang dibutuhkan dalam kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD tidak dapat disediakan tepat waktu	Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	External	C	Terganggunya pekerjaan administrasi perkantoran	CAMAT
5.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	RSK MJ 29	Pemeliharaan server tidak tepat waktu	Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	External	C	Terganggunya pekerjaan administrasi perkantoran	CAMAT
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	RK MJ 06	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Tertunda	Kekurangan/ketidakterseediaan anggaran	Internal	C	Sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan administrasi kantor kurang terpenuhi	CAMAT
6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSK MJ 30	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana	Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi	External	C	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak tersedia	CAMAT
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSK MJ 31	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terlaksana	Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	External	C	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak tersedia	CAMAT
6.3	Pengadaan Mebel	RSK MJ 32	Pengadaan Mebel tidak terlaksana	Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	External	C	Mebel tidak tersedia/tidak sesuai kebutuhan	CAMAT
6.4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSK MJ 33	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak terlaksana	Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	Eksternal	C	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak tersedia/tidak sesuai kebutuhan	CAMAT



7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RK MJ 07	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Tertunda	Waktu Penyelesaian Tidak Cukup	Internal	C	Pelayanan Dan Administrasi Kantor Terhambat	CAMAT
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSK MJ 34	Tidak cukupnya anggaran Jasa Surat Menyurat	Alokasi anggaran yang disiapkan tidak sesuai kebutuhan	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan terganggu	CAMAT
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSK MJ 35	Alokasi dana yang disiapkan tidak mencukupi untuk pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Petugas Pelaksana yang menghitung kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik pada tahun 2023	Eksternal	UC	Adanya Pemutusan jaringan internet dari Pihak Ketiga dan Kinerja Petugas Pelaksana pada Sub Bagian Umum & Tatalaksana	CAMAT
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSK MJ 36	Petugas kurang teliti dalam perhitungan gaji Non ASN	Adanya kesalahan penginputan nilai nominal gaji non ASN	Internal	C	Keterlambatan pembayaran gaji Non ASN, kesalahan perhitungan Non ASN	CAMAT
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RK MJ 08	Aset BMD Tidak Terpelihara	Lemahnya Pengawasan Dan Tidak Adanya Lembar Control Aset Yang Dipelihara	internal	C	Aset BMD Dipergunakan Tidak Sesuai Peruntukannya	CAMAT
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSK MJ 37	Jadwal pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan jabatan belum tersusun	Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan lalai dalam menyusun jadwal	Eksternal dan Intrnal	C	Pemeliharaan kendaraan tidak efektif dan terkontrol	CAMAT
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSK MJ 38	Jadwal pemeliharaan dan pembayaran pajak setiap unit kendaraan Operasional atau Lapangan belum tersusun	Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan Operasional atau Lapangan lalai dalam menyusun jadwal	Eksternal dan Intrnal	C	Pemeliharaan kendaraan tidak efektif dan terkontrol	CAMAT
8.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	RSK MJ 39	Jadwal pemeliharaan dan pembayaran alat besar (excavator mini) belum tersusun	Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan lalai dalam menyusun jadwal	Eksternal dan Intrnal	C	Pemeliharaan alat besar (excavator mini) tidak efektif dan terkontrol	CAMAT



8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSK MJ 40	Pemeliharaan peralatan dan mesin tidak terkontrol	Pengurus barang tidak mencatat BMD yang perlu dilakukan pemeliharaan sesuai KIB	Eksternal dan Intrnal	C	Peralatan dan mesin yang dimiliki tidak dapat mendukung pelaksanaan aktivitas pekerjaan dan capaian kinerja secara optimal, tidak terlaksananya kegiatan pemeliharaan	CAMAT
8.5	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	RSK MJ 41	Belum tersusunnya rincian kebutuhan unit dan biaya yang diperlukan dalam rangka Pemeliharaan dan Rehabilitasi Aset Tetap lainnya (LPJU)	Pejabat Fungsional Pelaksana yang menangani Pemeliharaan dan Rehabilitasi belum melakukan survei kondisi faktual dan biaya yang diperlukan untuk memelihara/merehabilitasi kerusakan Aset Tetap lainnya (LPJU)	Internal	C	Aset Tetap lainnya (LPJU) tidak dapat dipelihara dan direhabilitasi secara optimal	CAMAT
8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RSK MJ 42	Belum tersusunnya rincian kebutuhan unit dan biaya yang diperlukan dalam rangka Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pejabat Fungsional Pelaksana yang menangani Pemeliharaan dan Rehabilitasi belum melakukan survei kondisi faktual dan biaya yang diperlukan untuk memelihara/merehabilitasi kerusakan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Internal	C	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang tidak dapat dipelihara dan direhabilitasi secara optimal	CAMAT
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN	RP MJ 02	Tidak semua pengajuan pelayanan perijinan dan non perijinan ditindaklanjuti	Dokumen pengajuan tidak lengkap sesuai SOP	Eksternal	Uncontrol	Rendahnya persentase Pelayanan	CAMAT



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Integritas, Kompeten,
Harmonis, Loyol, Adaptif, Kolaborasi



		RSK MJ 48	Tidak optimalnya penyaluran bantuan bagi korban bencana	1. Kejadian dan Jumlah korban bencana yang tidak dapat diprediksi; 2. Keterbatasan anggaran	Eksternal	UC	Banyak korban bencana yang tidak emndapat bantuan	CAMAT
10.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	RSK MJ 49	Volume dan kualitas pekerjaan kurang	pelaksana pekerjaan tidak sesuai RAB	Internal & Eksternal	Control	Potensi temuan LHP BPK/Inspektorat dan target pembangunan sapras tidak tercapai	CAMAT
		RSK MJ 50	Volume dan kualitas pekerjaan kurang	pelaksana pekerjaan tidak sesuai RAB	Internal & Eksternal	Control	Potensi temuan LHP BPK/Inspektorat dan target pembangunan sapras tidak tercapai	CAMAT
		RSK MJ 51	Volume dan kualitas pekerjaan kurang	pelaksana pekerjaan tidak sesuai RAB	Internal & Eksternal	Control	Potensi temuan LHP BPK/Inspektorat dan target pembangunan sapras tidak tercapai	CAMAT
		RSK MJ 52	Volume dan kualitas pekerjaan kurang	pelaksana pekerjaan tidak sesuai RAB	Internal & Eksternal	Control	Potensi temuan LHP BPK/Inspektorat dan target pembangunan sapras tidak tercapai	CAMAT
		RSK MJ 53	Volume dan kualitas pekerjaan kurang	pelaksana pekerjaan tidak sesuai RAB	Internal & Eksternal	Control	Potensi temuan LHP BPK/Inspektorat dan target pembangunan sapras tidak tercapai	CAMAT



		RSK MJ 54	Volume dan kualitas pekerjaan kurang	pelaksana pekerjaan tidak sesuai RAB	Internal & Eksternal	Control	Potensi temuan LHP BPK/Inspektorat dan target pembangunan sapras tidak tercapai	CAMAT
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	RP MJ 04	Alokasi anggaran yang kurang	Terdapat Kegiatan Lembaga yang di luar dari perencanaan anggaran	Eksternal/ Internal	Uncontrol/Control	Menurunnya Keaktifan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Melaksanakan Kegiatan di wilayah masing-masing	CAMAT
11	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	RK MJ 11	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tidak maksimal	Kesadaran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan masih rendah	Eksternal	UC	Rendahnya Kegiatan pemberdayaan masyarakat	CAMAT
11.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	RSK MJ 55	Tidak tersampainya undangan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan kepada Masyarakat	Undangan tidak tersampaikan secara langsung kepada pihak yang diundang	Internal	C	Tingkat partisipasi lembaga masyarakat dalam musrenbang menurun	CAMAT
		RSK MJ 56	Keterlambatan/tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan Bupati Cup	1. Proses penyediaan anggaran (DPA) terlambat karena adanya efisiensi anggaran; 2. Penyediaan barang/jasa terlambat dilaksanakan; 3. Kurangnya koordinasi dengan Komite Olahraga Kecamatan Muara Jawa	Internal & Eksternal	C	Kegiatan tidak dapat diikuti	CAMAT
11.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	RSK MJ 57	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tidak terlaksana tepat waktu	1. Keterlambatan proses pemilihan penyedia karena PPBJ dan calon penyedia	Internal dan Eksternal	C & UC	Progres Pembangunan Kemajuan	CAMAT



BerAKHLAK
Berorientasi Pelanggan, Berimbas, Berkompetensi,
Inspirasi, Layak, Adaptif, Kolaborasi



			serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan					
13	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	RK MJ 13	Setiap unsur Muspika menjalankan upaya penyelenggaraan trantib secara terpisah	Kurangnya koordinasi lintas sektoral	Eksternal dan Internal	C	Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum tidak optimal	CAMAT
13.1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	RSK MJ 63	Keterlambatan/tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan	1. Proses penyediaan anggaran (DPA) terlambat karena adanya efisiensi anggaran; 2. Penyediaan barang/jasa terlambat dilaksanakan; 3. Kurangnya koordinasi dengan Tomag dan Tomas	External	C	Hubungan dengan Tomag dan Tomas kurang harmonis	CAMAT
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	RP MJ 06	Masih rendahnya kompetensi SDM petugas pelayanan umum dalam menjalankan fungsi pelayanan	Kurangnya pemahaman terhadap SOP Pelayanan	Internal	C	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan rendah	CAMAT
14	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	RK MJ 14	Kegiatan Urusan Pemerintahan Tidak Terlaksana Seluruhnya	Penjadwalan Pelaksanaan Kegiatan Yang Kurang Matang	Internal	C	Kinerja Pemerintah Kecamatan Kurang Optimal	CAMAT
14.1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	RSK MJ 64	Ketidaksiapan Kecamatan Muara Jawa dan Kelurahan untuk mengikuti kegiatan	Jadwal kegiatan yang belum tentu sehingga tidak sesuai dengan anggaran kas	Internal	C	Kegiatan diikuti dengan tidak optimal	CAMAT



Tabel
Hasil Analisis Risiko Program dan Kegiatan

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan SOP)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/ Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
RP MJ 01	Tidak Lengkapnya Data Pendukung Yang Digunakan Dalam Penilaian SAKIP disebabkan kurangnya pemahaman pengampu dalam memenuhi data pendukung	3	3	9	Sedang	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;	Memadai	Tidak Efektif	Ada
RK MJ 01	Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Terlambat Dibuat disebabkan oleh Tidak Lengkapnya Data Yang Dibutuhkan	3	4	12	Sangat Tinggi	SOP / Laporan Anggaran Masing-masing Kasi Kasubbag.	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 01	Data rincian kebutuhan dan anggaran (Sub Kegiatan) yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah belum tersusun dengan optimal disebabkan oleh Pejabat Pelaksana belum mengidentifikasi kebutuhan Barang /Jasa dan anggaran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya	2	2	4	Rendah	Renja, RKBMD, Kepmendagrai No 900.1.15.5.3406 tahun 2024 , Inpres No 1 Tahun 2025	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 02	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran terhambat karena Aplikasi dan sistem kadang terganggu pada saat login Aplikasi disebabkan oleh Jaringan telekomunikasi kurang stabil	3	4	12	Sangat Tinggi	SOP, PP No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kepmendagrai No 900.1.15.5.3406 tahun 2024 , Inpres No 1 Tahun 2025	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 03	Dokumen Perubahan tidak dapat tersaji secara tepat waktu karena keterbatasan waktu penyusunan Dokumen disebabkan oleh Terbatasnya waktu yang diberikan dalam penyusunan Dokumen Anggaran Perubahan SKPD	3	4	12	Sangat Tinggi	SOP, SE Bupati Kutai Kartanegara No B-2588/BPKAD/BAN.I/065.11/09/2025, Kepmendagrai No 900.1.15.5.3406 tahun 2024 , Inpres No 1 Tahun 2025	Memadai	Efektif	Ada



Kecamatan Muara Jawa
Laporan Unit Pengelolaan Risiko Triwulan II Tahun 2025

RSK MJ 04	Data Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja terlambat disampaikan Pejabat Pelaksana kepada Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan disebabkan oleh Pelaksana kegiatan tidak membuat laporan progres capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan	3	4	12	Sangat Tinggi	SOP, PP No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kepmendagri No 900.1.15.5.3406 tahun 2024 , Inpres No 1 Tahun 2025	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 05	Data capaian kinerja terlambat disampaikan oleh Pejabat Pelaksana kepada Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan disebabkan oleh Pelaksana kegiatan tidak membuat laporan progres capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan	3	4	12	Sangat Tinggi	SOP, PP No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kepmendagri No 900.1.15.5.3406 tahun 2024 , Inpres No 1 Tahun 2025	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 06	Data Statistik Sektorial yang disampaikan tidak relevan disebabkan oleh Pelaksana kegiatan tidak memahami cara mengumpulkan dan menyampaikan data	3	4	12	Sangat Tinggi	SOP, Panduan penginputan data pada aplikasi BECIK	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 07	Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah disebabkan oleh Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tidak dihadiri	3	4	12	Sangat Tinggi	Undangan-undangan Lintas PD	Memadai	Efektif	Ada
RK MJ 02	Dokumen Administrasi Keuangan Yang Dibuat Tidak Valid disebabkan oleh Tidak Lengkapnya Data Yang Dibutuhkan	3	3	9	Tinggi	SOP / Laporan Pendukung Masing-masing Kasi Kasubbag.	memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 08	Kurangnya anggaran gaji dan tunjangan disebabkan oleh 1. Perubahan nilai gaji karena Berubahnya data pegawai baik karena kenaikan pangkat/KGB/bertambahnya anggota keluarga yang ditunjang; 2. Ketidaktepatan dalam menyusun skema anggaran kas bulanan; 3. Perubahan peraturan dasar dalam perhitungan gaji/BPJS/Pajak penghasilan	3	4	12	Sangat Tinggi	1. Aplikasi Gaji; Daftar pegawai yang naik pangkat/KGB/bertambahnya tanggungan; 2.	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 09	Belum sinkronnya data Keuangan dan Aset pada saat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun disebabkan oleh Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak melaksanakan rekonsiliasi data barang dan data keuangan secara rutin	3	4	12	Sangat Tinggi	SOP Laporan Keuangan, Kepmendagri No 900.1.15.5.3406 tahun 2024 , Inpres No 1 Tahun 2025, Instruksi Bupati Kutai Kartanegara terkait batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun	belum Memadai	Tidak Efektif	Ada
RSK MJ 10	Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan	3	4	12	Sangat Tinggi	SOP Pertanggungjawaban Belanja (SPJ), Aplikasi SIMDA Keuangan	Memadai	Efektif	Ada



	Bulanan/Triwulan/Semesteran belum disusun sesuai dengan realisasi pelaksanaan kegiatan disebabkan oleh Pelaksana kegiatan belum membuat rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan								
RSK MJ 11	Belum sinkronnya data Keuangan dan Aset pada saat Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Semester 1 dan Prognosis Semester 2 disebabkan oleh Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak melaksanakan rekonsiliasi data barang dan data keuangan secara rutin	3	4	12	Sangat Tinggi	SOP Pertanggungjawaban Belanja (SPJ), Aplikasi SIMDA Keuangan, Kepmendagri No 900.1.15.5.3406 tahun 2024, Inpres No 1 Tahun 2025, Instruksi Bupati Kutai Kartanegara terkait batas waktu penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Semester 1 dan prognosis semester 2	Memadai	Efektif	Ada
RK MJ 03	Barang Milik Daerah Tidak Teradministrasi Dengan Lengkap disebabkan Tidak Lengkapnya Dokumen Pengadaan dan Dokumen Pendukung	2	2	4	Rendah	SOP / Aplikasi Simda BMD	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 12	Perkiraan Kebutuhan yang Tidak Akurat disebabkan Penyusunan kebutuhan barang tidak berdasarkan data yang akurat dan analisis yang cermat	2	2	4	Rendah	1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014: (sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020) tentang Pengelolaan BMD; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 13	Pengurus barang tidak mendokumentasikan dan menginput hasil pelaksanaan PBJ kedalam sistem aplikasi SIMDA disebabkan oleh Pengurus barang tidak memperoleh data secara rinci yang diperlukan dalam pencatatan dan pendokumentasian dari pelaksana PBJ	3	4	12	Sangat Tinggi	1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014: (sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020) tentang Pengelolaan BMD; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai	Memadai	Efektif	Ada



						Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah			
RSK MJ 14	Barang Milik Daerah tidak dapat diketahui nilai wajarnya disebabkan oleh Banyak BMD yang umur barang yang sudah melebihi umur ekonomisnya, kerusakan, atau karena alasan force majeure (kecelakaan atau kejadian tak terduga) namun masih tercatat di neraca SKPD dengan nilai yang tinggi	4	3	12	Sangat Tinggi	1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014: (sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020) tentang Pengelolaan BMD; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 15	Data barang milik daerah dengan fisik barang yang ada tidak sesuai disebabkan oleh Pengurus barang kurang teliti dan cermat dalam memeriksa barang hasil pengadaan yang dilaksanakan oleh Ppkom ketika barang diserahkan terimakan	3	3	9	Tinggi	SOP Pertanggungjawaban Belanja (SPJ), Aplikasi Simda BMD, Kepmendagri No 900.1.15.5.3406 tahun 2024 , Inpres No 1 Tahun 2025	Belum Memadai	Tidak Efektif	Ada
RK MJ 04	Data Pegawai Tidak Teradministrasi Dengan Lengkap disebabkan oleh Masih terdapat beberapa Pegawai yang belum menginput data kepegawaian di Aplikasi SIMPEG	3	4	12	Sangat Tinggi	SOP / Evaluasi Data SDM	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 16	Keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang disebabkan oleh Proses pemilihan penyedia barang yang terlambat dilaksanakan	3	4	12	Sangat Tinggi	DPA, Anggaran Kas, Pengumuman paket pekerjaan di aplikasi RUP	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 17	Pendidikan dan Pelatihan tidak terlaksana disebabkan oleh Kesulitan dalam pemenuhan materi dan narasumber yang kompeten	3	4	12	Sangat Tinggi	Melakukan koordinasi dengan BKPSDM	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 18	Kurangnya Sosialisasi Peraturan Perundangan undangan disebabkan oleh Minimnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan	3	4	12	Sangat Tinggi	Mengatur Jadwal sosialisasi	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 19	Kurangnya Implementasi peraturan perundang-undangan ASN disebabkan oleh Kurang pemahaman terakut Peraturan Perundang-undangan	3	4	12	Sangat Tinggi	melaksanakan bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Memadai	Efektif	Ada



RK MJ 05	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tidak sesuai kebutuhan disebabkan oleh Kurangnya Sumber Daya Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	4	16	Sangat Tinggi	SOP / Evaluasi Data SDM	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 20	Aliran listrik mengalami gangguan disebabkan oleh Instalasi listrik bermasalah	3	4	12	Sangat Tinggi	Pengecekan Jaringan dan Instalasi Listrik secara berkala	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 21	Penyediaan ATK tidak tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	3	4	12	Sangat Tinggi	Rencana pemilihan penyedia telah diumumkan dalam RUP, KAK tersedia, DPPA setelah efisiensi/rasionalisasi dalam proses asistensi	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tidak tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	3	4	12	Sangat Tinggi	Rencana pemilihan penyedia telah diumumkan dalam RUP, KAK tersedia, DPPA setelah efisiensi/rasionalisasi dalam proses asistensi	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	3	4	12	Sangat Tinggi	Rencana pemilihan penyedia telah diumumkan dalam RUP, KAK tersedia, DPPA setelah efisiensi/rasionalisasi dalam proses asistensi	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	3	4	12	Sangat Tinggi	Rencana pemilihan penyedia telah diumumkan dalam RUP, KAK tersedia, DPPA setelah efisiensi/rasionalisasi dalam proses asistensi	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 25	Penyediaan Bahan/Material tidak tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	3	4	12	Sangat Tinggi	Rencana pemilihan penyedia telah diumumkan dalam RUP, KAK tersedia, DPPA setelah efisiensi/rasionalisasi dalam proses asistensi	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 26	Kunjungan tamu tidak dapat difasilitasi tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	3	4	12	Sangat Tinggi	Rencana pemilihan penyedia telah diumumkan dalam RUP, KAK tersedia, DPPA setelah efisiensi/rasionalisasi dalam proses asistensi	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 27	Pembayaran biaya perjalanan dinas tidak dapat dibayarkan tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	3	4	12	Sangat Tinggi	Rencana pemilihan penyedia telah diumumkan dalam RUP, KAK tersedia, DPPA setelah efisiensi/rasionalisasi dalam proses asistensi	Memadai	Efektif	Ada



RSK MJ 28	Barang-barang yang dibutuhkan dalam kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD tidak dapat disediakan tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	3	4	12	Sangat Tinggi	Rencana pemilihan penyedia telah diumumkan dalam RUP, KAK tersedia, DPPA setelah efisiensi/rasionalisasi dalam proses asistensi	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 29	Pemeliharaan server tidak tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	3	4	12	Sangat Tinggi	Rencana pemilihan penyedia telah diumumkan dalam RUP, KAK tersedia, DPPA setelah efisiensi/rasionalisasi dalam proses asistensi	Memadai	Efektif	Ada
RK MJ 06	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Tertunda disebabkan oleh Kekurangan/ketidakterediaan anggaran	3	3	9	Tinggi	SOP / Koordinasi dan melakukan Survey	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 30	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi	3	3	9	Tinggi	RKBMD/RKPBMD	Memadai	Efektif	Tidak
RSK MJ 31	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terlaksana disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	3	3	9	Tinggi	RKBMD/RKPBMD	Memadai	Efektif	Tidak
RSK MJ 32	Pengadaan Mebel tidak terlaksana disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	3	3	9	Tinggi	RKBMD/RKPBMD	Memadai	Efektif	Tidak
RSK MJ 33	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak terlaksana disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	3	3	9	Tinggi	RKBMD/RKPBMD	Memadai	Efektif	Tidak
RK MJ 07	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Tertunda disebabkan oleh Waktu Penyelesaian Tidak Cukup	3	3	9	Tinggi	SOP / Koordinasi dan melakukan Survey	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 34	Tidak cukupnya anggaran Jasa Surat Menyurat disebabkan oleh Alokasi anggaran yang disiapkan tidak sesuai kebutuhan	1	2	2	Rendah	Membuat anggaran kebutuhan surat menyurat di masing-masing DPA	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 35	Alokasi dana yang disiapkan tidak mencukupi untuk pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik disebabkan oleh Petugas Pelaksana yang menghitung kebutuhan jasa	3	4	12	Sangat Tinggi	SOP Pertanggungjawaban Belanja	Memadai	Efektif	Ada



	komunikasi sumber daya air dan listrik pada tahun 2023								
RSK MJ 36	Petugas kurang teliti dalam perhitungan gaji Non ASN disebabkan oleh Adanya kesalahan penginputan nilai nominal gaji non ASN	3	4	12	Sangat Tinggi	Lembar Verifikasi	Memadai	Efektif	Ada
RK MJ 08	Aset BMD Tidak Terpelihara disebabkan oleh Lemahnya Pengawasan Dan Tidak Adanya Lembar Control Aset Yang Dipelihara	3	3	9	Tinggi	SOP / Aplikasi SIMDA BMD	memadai	Efektif	Tidak
RSK MJ 37	Jadwal pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan jabatan belum tersusun disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan lalai dalam menyusun jadwal	3	3	9	Tinggi	Kepmendagri No 900.1.15.5.3406 tahun 2024 , Inpres No 1 Tahun 2025	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 38	Jadwal pemeliharaan dan pembayaran pajak setiap unit kendaraan Operasional atau Lapangan belum tersusun disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan Operasional atau Lapangan lalai dalam menyusun jadwal	3	3	9	Tinggi	Kepmendagri No 900.1.15.5.3406 tahun 2024 , Inpres No 1 Tahun 2025	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 39	Jadwal pemeliharaan dan pembayaran alat besar (excavator mini) belum tersusun disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan lalai dalam menyusun jadwal	3	3	9	Tinggi	Kepmendagri No 900.1.15.5.3406 tahun 2024 , Inpres No 1 Tahun 2025	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 40	Pemeliharaan peralatan dan mesin tidak terkontrol disebabkan oleh Pengurus barang tidak mencatat BMD yang perlu dilakukan pemeliharaan sesuai KIB	3	3	9	Tinggi	Kepmendagri No 900.1.15.5.3406 tahun 2024 , Inpres No 1 Tahun 2025	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 41	Belum tersusunnya rincian kebutuhan unit dan biaya yang diperlukan dalam rangka Pemeliharaan dan Rehabilitasi Aset Tetap lainnya (LPJU) disebabkan oleh Pejabat Fungsional Pelaksana yang menangani Pemeliharaan dan Rehabilitasi belum melakukan survei kondisi faktual dan biaya yang diperlukan untuk memelihara/merehabilitasi kerusakan Aset Tetap lainnya (LPJU)	3	3	9	Tinggi	Kepmendagri No 900.1.15.5.3406 tahun 2024 , Inpres No 1 Tahun 2025	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 42	Belum tersusunnya rincian kebutuhan unit dan biaya yang diperlukan dalam rangka Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya disebabkan oleh Pejabat Fungsional	3	3	9	Tinggi	Kepmendagri No 900.1.15.5.3406 tahun 2024 , Inpres No 1 Tahun 2025	Memadai	Efektif	Ada



	Pelaksana yang menangani Pemeliharaan dan Rehabilitasi belum melakukan survei kondisi faktual dan biaya yang diperlukan untuk memelihara/merehabilitasi kerusakan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
RP MJ 02	Tidak semua pengajuan pelayanan perijinan dan non perijinan ditindaklanjuti disebabkan Dokumen pengajuan tidak lengkap sesuai SOP	3	3	9	Sedang	1. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara; dan 2. SK Camat Muara Jawa No. P-001/YANMUM/067/01/2024 Tentang Standar Pelayanan Publik Kecamatan Muara Jawa	Memadai	Tidak Efektif	Ada
RP MJ 03	kegiatan yang tidak sesuai dengan target prioritas disebabkan ketersediaan data dan informasi yang kurang valid	3	3	9	Sedang	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 247/SK-BUP/HK/2021 Tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat	Memadai	Tidak Efektif	Ada
RK MJ 09	Tidak terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintrah yang tidak dilaksanakan Unit Kerja Lainnya disebabkan oleh Kurangnya koordinasi dengan Instansi Vertikal Terkait	4	3	12	Sangat Tinggi	SOP Pelayanan Minimal	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 43	Koordinasi/sinergi lintas sektoral idak maksimal disebabkan oleh Kurangnya koordinasi/sinergi dengan instansi vertikal	3	3	9	Tinggi	SOP Pelayanan Minimal, Kepmendagrai No 900.1.15.5.3406 tahun 2024 , Inpres No 1 Tahun 2025	Memadai	Efektif	Tidak
RSK MJ 44	Kegiatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhambat disebabkan oleh Anggaran berkurang karena adanya efisiensi belanja	2	2	4	Rendah	Rapat Penyusunan Anggaran dan skema anggaran kasa	Memadai	Efektif	Ada
RK MJ 10	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Camat Tidak Terlaksana Dengan Baik disebabkan oleh Tidak Ada Sosialisasi Kegiatan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Camat	3	3	9	Tinggi	SOP	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 45	Belum maksimalnya Pengelolaan Sampah Kecamatan disebabkan oleh 1. SDM dan sarana prasarana pengelolaan sampah kurang; 2. Rendahnya kesadaran masyarakat atas tatacara pembuangan sampah di TPS	2	2	4	Rendah	DPA, Anggaran Kas, RKBMD/RKPBMD, personil pengelolaan persampahan	Memadai	Efektif	Ada



Kecamatan Muara Jawa
Laporan Unit Pengelolaan Risiko Triwulan II Tahun 2025

RSK MJ 46	Belum optimalnya Pemeliharaan LPJU di 8 Kelurahan disebabkan oleh Jumlah anggaran tidak sesuai dengan jumlah LPJU jalan pemukiman yang membutuhkan pemeliharaan	2	2	4	Rendah	DPA, Anggaran Kas, RKPBM	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 47	Pelatihan Service Excellent bagi Petugas PATEN Kecamatan dan Kelurahan tidak terlaksana disebabkan oleh Efisiensi anggaran sehingga berkurangnya / dihapusannya alokasi anggaran untuk pelaksanaan bimtek	2	2	4	Rendah	DPA, Anggaran Kas	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 48	Tidak optimalnya penyaluran bantuan bagi korban bencana disebabkan oleh 1. Kejadian dan Jumlah korban bencana yang tidak dapat diprediksi; 2. Keterbatasan anggaran	3	3	9	Tinggi	1. SOP Penanganan darurat bencana; 2. DPA	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 49	Volume dan kualitas pekerjaan kurang disebabkan oleh pelaksana pekerjaan tidak sesuai RAB	2	2	4	Rendah	RAB	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 50	Volume dan kualitas pekerjaan kurang disebabkan oleh pelaksana pekerjaan tidak sesuai RAB	2	2	4	Rendah	RAB	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 51	Volume dan kualitas pekerjaan kurang disebabkan oleh pelaksana pekerjaan tidak sesuai RAB	2	2	4	Rendah	RAB	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 52	Volume dan kualitas pekerjaan kurang disebabkan oleh pelaksana pekerjaan tidak sesuai RAB	2	2	4	Rendah	RAB	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 53	Volume dan kualitas pekerjaan kurang disebabkan oleh pelaksana pekerjaan tidak sesuai RAB	2	2	4	Rendah	RAB	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 54	Volume dan kualitas pekerjaan kurang disebabkan oleh pelaksana pekerjaan tidak sesuai RAB	2	2	4	Rendah	RAB	Memadai	Efektif	Ada
RP MJ 04	Alokasi anggaran yang kurang disebabkan Terdapat Kegiatan Lembaga yang di luar dari perencanaan anggaran	2	4	8	Sedang	Penyusunan rencana kerja anggaran dalam setahun	Memadai	Tidak Efektif	Ada
RK MJ 11	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tidak maksimal disebabkan oleh Kesadaran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan masih rendah	3	4	12	Sangat Tinggi	Kepatuhan	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 55	Tidak tersampainya undangan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan kepada Masyarakat disebabkan oleh	3	3	9	Tinggi	SOP Musrenbang Kecamatan, Kepmendagri No 900.1.15.5.3406 tahun 2024 , Inpres No 1 Tahun 2025	Memadai	Efektif	Ada



Kecamatan Muara Jawa
Laporan Unit Pengelolaan Risiko Triwulan II Tahun 2025

	Undangan tidak tersampaikan secara langsung kepada pihak yang diundang								
RSK MJ 56	Keterlambatan/tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan Bupati Cup disebabkan oleh 1. Proses penyediaan anggaran (DPA) terlambat karena adanya efisiensi anggaran; 2. Penyediaan barang/jasa terlambat dilaksanakan; 3. Kurangnya koordinasi dengan Komite Olahraga Kecamatan Muara Jawa	3	3	9	Tinggi	1. DPA; 2. Angkas; 3. Kepengurusan KOK Muara Jawa yang aktif	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 57	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tidak terlaksana tepat waktu disebabkan oleh 1. Keterlambatan proses pemilihan penyedia karena PPBJ dan calon penyedia terbatas; 2. Kelangkaan material;	3	4	12	Sangat Tinggi	1. DPA; 2. Angkas; 3. SDM Pelaksana (Lurah selaku KPA/PPKom dan PPTK di setiap Kelurahan, serta PPBJ)	Belum Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 58	Ketidaksiapan Kecamatan Muara Jawa dan Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan disebabkan oleh Efisiensi anggaran	3	4	12	Sangat Tinggi	1. DPA; 2. Angkas; 3. SDM Pelaksana (PPTK Kecamatan, Lurah selaku KPA/PPKom dan PPTK di setiap Kelurahan, serta PPBJ)	Belum Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 59	Terdapat kelurahan yang tidak mengikuti Lomba Kelurahan disebabkan oleh Ketidaksiapan Kelurahan dalam memenuhi syarat-syarat penilaian Lomba Kelurahan	3	4	12	Sangat Tinggi	1. Juknis Lomba Kelurahan; 2. SDM Pelaksana Kegiatan	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 60	Ketidaksiapan anggaran untuk mengikuti kegiatan disebabkan oleh Efisiensi anggaran	3	4	12	Sangat Tinggi	1. Juknis BBGRM; 2. SDM Pelaksana kegiatan	Memadai	Efektif	Ada
RK MJ 12	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tidak maksimal disebabkan oleh Kesadaran Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Dalam Kegiatan Pemberdayaan masih rendah	3	4	12	Sangat Tinggi	Kepmendagri No 900.1.15.5.3406 tahun 2024 , Inpres No 1 Tahun 2025	Tidak Memadai	Tidak Efektif	Ada
RSK MJ 61	Terdapat lembaga kemasyarakatan yang tidak melaksanakan kegiatan disebabkan oleh 1. Kepengurusan tidak aktif; 2. Efisiensi anggaran; 3. Jadwal kegiatan tidak sesuai anggaran kas	3	3	9	Tinggi	Kepmendagri No 900.1.15.5.3406 tahun 2024 , Inpres No 1 Tahun 2025	Tidak Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 62	Tidak terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan disebabkan oleh 1. Kepengurusan tidak aktif; 2. Efisiensi anggaran; 3. Jadwal kegiatan tidak sesuai anggaran kas	3	3	9	Tinggi	Kepmendagri No 900.1.15.5.3406 tahun 2024 , Inpres No 1 Tahun 2025	Tidak Memadai	Efektif	Ada
RP MJ 05	Tidak maksimalnya Kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang	4	3	12	Sedang Tinggi	1. SOP Kecamatan Muara Jawa Nomor B. 303/Trantib/300/04/2024	Memadai	Tidak Efektif	Ada



	melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan disebabkan oleh Kurangnya Koordinasi Antara Pimpinan Kecamatan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Tentang Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum; 2. SOP Kecamatan Muara Jawa Nomor B. 304/Trantib/300/04/2024 Tentang Penanganan Sengketa dan Pengaduan Lain; 3. SOP Kecamatan Muara Jawa Nomor 305/Trantib/340/4/2024 Tentang Penanganan Bencana; 4. SOP Kecamatan Muara Jawa Nomor 306/Trantib/340/3/2024 Tentang Pelayanan Rekomendasi SKCK; 5. SOP Kecamatan Muara Jawa Nomor 307/Trantib/300/4/2024 Tentang Surat Rekomendasi Izin Keramaian.			
RK MJ 13	Setiap unsur Muspika menjalankan upaya penyelenggaraan trantib secara terpisah disebabkan oleh Kurangnya koordinasi lintas sektoral	3	4	12	Sangat Tinggi	Tidak ada	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 63	Keterlambatan/tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan disebabkan oleh 1. Proses penyediaan anggaran (DPA) terlambat karena adanya efisiensi anggaran; 2. Penyediaan barang/jasa terlambat dilaksanakan; 3. Kurangnya koordinasi dengan Tomag dan Tomas	3	4	12	Sangat Tinggi	1. SK Pelaksana Kegiatan; 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;	Memadai	Efektif	Ada
RP MJ 06	Masih rendahnya kompetensi SDM petugas pelayanan umum dalam menjalankan fungsi pelayanan disebabkan oleh Kurangnya pemahaman terhadap SOP Pelayanan	2	5	10	Sedang	SOP Kecamatan Muara Jawa Nomor B.010/CMJ/01/2022 Tentang Pengukuran Kinerja	Memadai	Efektif	Ada
RK MJ 14	Kegiatan Urusan Pemerintahan Tidak Terlaksana Seluruhnya disebabkan oleh Penjadwalan Pelaksanaan Kegiatan Yang Kurang Matang	3	4	12	Sangat Tinggi	DPA, Anggaran Kas, SK	Memadai	Efektif	Ada
RSK MJ 64	Ketidaksiapan Kecamatan Muara Jawa dan Kelurahan untuk mengikuti kegiatan disebabkan oleh Jadwal kegiatan yang belum tentu sehingga tidak sesuai dengan anggaran kas	3	4	12	Sangat Tinggi	DPA, Anggaran Kas, SK	Memadai	Efektif	Ada



d. Hasil Evaluasi Risiko Program dan Kegiatan Eselon III sebagai berikut:

Tabel
Hasil Evaluasi Risiko Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Skor	Kategori/ peringkat risiko	Respon Risiko (Diterima/mitigasi, dihindari dan ditransfer)	Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Status Risiko setelah ada Penanganan (Risk After Mitigation)		
						Kemungkinan (Likelihood)	Dampak (Impact)	Level Risiko
RP MJ 01	Tidak Lengkapnya Data Pendukung Yang Digunakan Dalam Penilaian SAKIP disebabkan kurangnya pemahaman pengampu dalam memenuhi data pendukung	9	Sedang	Mitigasi	Mengadakan PKS (Pelatihan Kantor Sendiri) terkait pemenuhan dokumen SAKIP pada seluruh Pengawai	2	2	4
RK MJ 01	Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Terlambat Dibuat disebabkan oleh Tidak Lengkapnya Data Yang Dibutuhkan	12	Sangat Tinggi	Mitigasi	Monitoring Rencana Kerja, Laporan Evaluasi Kinerja Masing-masing Kasi dan Kasubbag Disampaikan Tepat Waktu Setiap Bulan	3	3	9
RSK MJ 01	Data rincian kebutuhan dan anggaran (Sub Kegiatan) yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah belum tersusun dengan optimal disebabkan oleh Pejabat Pelaksana belum mengidentifikasi kebutuhan Barang /Jasa dan anggaran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya	4	Rendah	Mitigasi	Instruksi Camat kepada seluruh pejabat struktural dan pelaksana kegiatan untuk menginventarisir rincian kebutuhan dan biaya yang diperlukan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan disampaikan kepada kasubag program dan keuangan	2	2	4
RSK MJ 02	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran terhambat karena Aplikasi dan sistem kadang terganggu pada saat login Aplikasi disebabkan	12	Sangat Tinggi	Mitigasi	Instruksi Camat agar memantau dan Monitoring Sistem dan Aplikasi sehingga Penyusunan	3	2	6



	oleh Jaringan telekomunikasi kurang stabil				DPA dapat segera tersusun			
RSK MJ 03	Dokumen Perubahan tidak dapat tersaji secara tepat waktu karena keterbatasan waktu penyusunan Dokumen disebabkan oleh Terbatasnya waktu yang diberikan dalam penyusunan Dokumen Anggaran Perubahan SKPD	12	Sangat Tinggi	Mitigsi	Instruksi Camat kepada Pelaksana Penyusunan Program dan Keuangan agar segera menyusun Dokumen DPA secepat mungkin sehingga dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan	2	3	6
RSK MJ 04	Data Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja terlambat disampaikan Pejabat Pelaksana kepada Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan disebabkan oleh Pelaksana kegiatan tidak membuat laporan progres capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan	12	Sangat Tinggi	Mitigsi	Instruksi Camat kepada Pelaksana kegiatan agar Data Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja disampaikan tepat waktu kepada Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	3	2	6
RSK MJ 05	Data capaian kinerja terlambat disampaikan oleh Pejabat Pelaksana kepada Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan disebabkan oleh Pelaksana kegiatan tidak membuat laporan progres capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan	12	Sangat Tinggi	Mitigsi	Instruksi Camat kepada Pelaksana kegiatan agar Data Capaian Kinerja disampaikan tepat waktu kepada Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan agar dapat disusun Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	3	2	6
RSK MJ 06	Data Statistik Sektoral yang disampaikan tidak relevan disebabkan oleh Pelaksana kegiatan tidak memahami cara mengumpulkan dan menyampaikan data	12	Sangat Tinggi	Mitigsi	Koordinasi dengan Bappeda selaku OPD serta melakukan pendampingan kepada [etugas pengumpul dan penginput data	3	2	6
RSK MJ 07	Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah disebabkan oleh Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tidak dihadiri	12	Sangat Tinggi	Mitigsi	Penunjukan personil untuk menghadiri Forum PD	3	2	6
RK MJ 02	Dokumen Administrasi Keuangan Yang Dibuat Tidak	9	Tinggi	Mitigsi	Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi Laporan	2	2	4



	Valid disebabkan oleh Tidak Lengkapnya Data Yang Dibutuhkan				Administrasi Keuangan Oleh Atasan Langsung Sebelum Disampaikan			
RSK MJ 08	Kurangnya anggaran gaji dan tunjangan disebabkan oleh 1. Perubahan nilai gaji karena Berubahnya data pegawai baik karena kenaikan pangkat/KGB/bertambahnya anggota keluarga yang ditunjang; 2. Ketidaktepatan dalam menyusun skema anggaran kas bulanan; 3. Perubahan peraturan dasar dalam perhitungan gaji/BPJS/Pajak penghasilan	12	Sangat Tinggi	Mitigasi	1. Permohonan pergeseran anggaran kas gaji dan tunjangan; 2. Permohonan pergeseran pagu antar rekening gaji dan tunjangan; 3. Permohonan penambahan pagu gaji dan tunjangan	2	2	4
RSK MJ 09	Belum sinkronnya data Keuangan dan Aset pada saat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun disebabkan oleh Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak melaksanakan rekonsiliasi data barang dan data keuangan secara rutin	12	Sangat Tinggi	Mitigasi	Instruksi Camat kepada Pengurus barang dan pejabat penatausahaan keuangan agar melaksanakan rekonsiliasi data barang dan data keuangan secara rutin	3	3	9
RSK MJ 10	Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran belum disusun sesuai dengan realisasi pelaksanaan kegiatan disebabkan oleh Pelaksana kegiatan belum membuat rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan	12	Sangat Tinggi	Mitigasi	Instruksi Camat kepada pelaksana kegiatan untuk membuat rekapitulasi/laporan realisasi pembayaran tepat waktu	2	3	6
RSK MJ 11	Belum sinkronnya data Keuangan dan Aset pada saat Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Semester 1 dan Prognosis Semester 2 disebabkan oleh Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak melaksanakan rekonsiliasi data	12	Sangat Tinggi	Mitigasi	Instruksi Camat kepada pelaksana kegiatan untuk membuat rekapitulasi/laporan realisasi pembayaran tepat waktu	2	3	6



	barang dan data keuangan secara rutin							
RK MJ 03	Barang Milik Daerah Tidak Teradministrasi Dengan Lengkap disebabkan Tidak Lengkapnya Dokumen Pengadaan dan Dokumen Pendukung	4	Rendah	Mitigasi	Pengurus Barang Melakukan Pemeriksaan Kesesuaian Dokumen dan Barang Sebelum Dilakukan Pencatatan	2	2	4
RSK MJ 12	Perkiraan Kebutuhan yang Tidak Akurat disebabkan Penyusunan kebutuhan barang tidak berdasarkan data yang akurat dan analisis yang cermat	4	Rendah	Mitigasi	Pejabat penatausahaan BMD dan Pengurus Barang mengumpulkan data-data RKBMD/RKPBMD dari setiap Kelurahan serta Bagian-bagian di Kecamatan dan melakukan verifikasi atas usulan-usulan tersebut	1	1	1
RSK MJ 13	Pengurus barang tidak mendokumentasikan dan menginput hasil pelaksanaan PBJ kedalam sistem aplikasi SIMDA disebabkan oleh Pengurus barang tidak memperoleh data secara rinci yang diperlukan dalam pencatatan dan pendokumentasian dari pelaksana PBJ	12	Sangat Tinggi	mitigasi	Nota Dinas dari Camat Kepada Pelaksana Kegiatan PBJ dan PPKom agar menyampaikan data dan informasi secara lengkap kepada pengurus barang, dan pengurus barang melakukan pencatatan dan pendokumentasian hasil PBJ dengan baik	2	2	4
RSK MJ 14	Barang Milik Daerah tidak dapat diketahui nilai wajarnya disebabkan oleh Banyak BMD yang umur barang yang sudah melebihi umur ekonomisnya, kerusakan, atau karena alasan force majeure (kecelakaan atau kejadian tak terduga) namun masih tercatat di neraca SKPD dengan nilai yang tinggi	12	Sangat Tinggi	Mitigasi	Koordinasi/Pendampingan dengan BPKAD Bidang Aset untuk melakukan penilaian atas nilai BMD Kecamatan Muara Jawa	3	3	9
RSK MJ 15	Data barang milik daerah dengan fisik barang yang ada tidak sesuai disebabkan oleh Pengurus barang kurang teliti dan cermat dalam memeriksa barang hasil pengadaan yang dilaksanakan oleh Ppkom	9	Tinggi	Mitigasi	Nota Dinas Camat kepada pengurus barang agar teliti dan cermat dalam memeriksa barang hasil pengadaan yang dilaksanakan oleh Ppkom	2	2	4



	dilaksanakan oleh Ppkom ketika barang diserahkan terimakan				ketika barang diserahkan terimakan			
RK MJ 04	Data Pegawai Tidak Teradministrasi Dengan Lengkap disebabkan oleh Masih terdapat beberapa Pegawai yang belum menginput data kepegawaian di Aplikasi SIMPEG	12	Sangat Tinggi	Mitigsi	Evaluasi Sumber Daya Manusia yang ada sebelum peaksanaan kegiatan	2	2	4
RSK MJ 16	Keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang disebabkan oleh Proses pemilihan penyedia barang yang terlambat dilaksanakan	12	Sangat Tinggi	Mitigsi	Instruksi Camat kepada Kasubag Umum ketatalaksanaan dan kepegawaian selaku PPTK untuk segera berproses	2	2	4
RSK MJ 17	Pendidikan dan Pelatihan tidak terlaksana disebabkan oleh Kesulitan dalam pemenuhan materi dan narasumber yang kompeten	12	Sangat Tinggi	Diterima	Instruksi Camat kepada Kasubag Umum ketatalaksanaan dan kepegawaian untuk berkoordinasi dengan BKPSDM terkait dengan kegiatan Diklat	2	2	4
RSK MJ 18	Kurangnya Sosialisasi Peraturan Perundangan undangan disebabkan oleh Minimnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan	12	Sangat Tinggi	Diterima	Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	2	2	4
RSK MJ 19	Kurangnya Implementasi peraturan perundang-undangan ASN disebabkan oleh Kurang pemahaman terakit Peraturan Perundang-undangan	12	Sangat Tinggi	Diterima	Melakukan bimtek, sosialisasi melalui website dan media sosial	2	2	4
RK MJ 05	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tidak sesuai kebutuhan disebabkan oleh Kurangnya Sumber Daya Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	16	Sangat Tinggi	Mitigsi	Evaluasi Sumber Daya Manusia yang ada sebelum peaksanaan kegiatan	3	3	9
RSK MJ 20	Aliran listrik mengalami gangguan disebabkan oleh Instalasi listrik bermasalah	12	Sangat Tinggi	Diterima	Penyiapan komponen listrik sesuai kebutuhan	2	2	4
RSK MJ 21	Penyediaan ATK tidak tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD	12	Sangat Tinggi	Diterima	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	2	2	4



	belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan							
RSK MJ 22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tidak tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	12	Sangat Tinggi	Diterima	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	2	2	4
RSK MJ 23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	12	Sangat Tinggi	Diterima	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	2	2	4
RSK MJ 24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	12	Sangat Tinggi	Diterima	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	2	2	4
RSK MJ 25	Penyediaan Bahan/Material tidak tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	12	Sangat Tinggi	Diterima	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	2	2	4
RSK MJ 26	Kunjungan tamu tidak dapat difasilitasi tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	12	Sangat Tinggi	Diterima	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	2	2	4
RSK MJ 27	Pembayaran biaya perjalanan dinas tidak dapat dibayarkan tepat waktu disebabkan oleh	12	Sangat Tinggi	Diterima	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	2	2	4



	Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan							
RSK MJ 28	Barang-barang yang dibutuhkan dalam kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD tidak dapat disediakan tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	12	Sangat Tinggi	Diterima	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	2	2	4
RSK MJ 29	Pemeliharaan server tidak tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	12	Sangat Tinggi	Diterima	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	2	2	4
RK MJ 06	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Tertunda disebabkan oleh Kekurangan/ketidaktersediaan anggaran	9	Tinggi	Mitigsi	Monitoring Dan Efisiensi Waktu Penyelesaian	2	2	4
RSK MJ 30	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi	9	Tinggi	Mitigsi	Usulan untuk mengembalikan pagu anggaran di APBD-Perubahan	3	2	6
RSK MJ 31	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terlaksana disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	9	Tinggi	Mitigsi	Instruksi Camat kepada Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian untuk melakukan penyesuaian kebutuhan anggaran dengan sisa anggaran yang tersedia	3	2	6
RSK MJ 32	Pengadaan Mebel tidak terlaksana disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD	9	Tinggi	Mitigsi	Instruksi Camat kepada Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian untuk	3	2	6



	belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan				melakukan penyesuaian kebutuhan anggaran dengan sisa anggaran yang tersedia			
RSK MJ 33	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak terlaksana disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	9	Tinggi	Mitigasi	Instruksi Camat kepada Kasi PMD untuk melakukan penyesuaian kebutuhan anggaran dengan sisa anggaran yang tersedia	3	2	6
RK MJ 07	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Tertunda disebabkan oleh Waktu Penyelesaian Tidak Cukup	9	Tinggi	Mitigasi	Monitoring Dan Efisiensi Waktu Penyelesaian	2	2	4
RSK MJ 34	Tidak cukupnya anggaran Jasa Surat Menyurat disebabkan oleh Alokasi anggaran yang disiapkan tidak sesuai kebutuhan	2	Rendah	Diterima	Menambah anggaran yang di butuhkan	1	1	1
RSK MJ 35	Alokasi dana yang disiapkan tidak mencukupi untuk pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik disebabkan oleh Petugas Pelaksana yang menghitung kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik pada tahun 2023	12	Sangat Tinggi	Mitigasi	Mengalokasikan/ menyediakana anggaran tambahan kegiatan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	3	3	9
RSK MJ 36	Petugas kurang teliti dalam perhitungan gaji Non ASN disebabkan oleh Adanya kesalahan penginputan nilai nominal gaji non ASN	12	Sangat Tinggi	Mitigasi	Instruksi Kepala Dinas kepada Sekretaris dan Kasubbag Kepegawaian beserta Petugas agar cermat dalam melaukan penginputan nilai nominal gaji non ASN	3	3	9
RK MJ 08	Aset BMD Tidak Terpelihara disebabkan oleh Lemahya Pengawasan Dan Tidak Adanya Lembar Control Aset Yang Dipelihara	9	Tinggi	Mitigasi	Membuat Lembar Control Penjagaan Perawatan Aset	2	2	4
RSK MJ 37	Jadwal pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan	9	Tinggi	Mitigasi	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana	3	2	6



	jabatan belum tersusun disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan lalai dalam menyusun jadwal				pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan			
RSK MJ 38	Jadwal pemeliharaan dan pembayaran pajak setiap unit kendaraan Operasional atau Lapangan belum tersusun disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan Operasional atau Lapangan lalai dalam menyusun jadwal	9	Tinggi	Mitigasi	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan	3	2	6
RSK MJ 39	Jadwal pemeliharaan dan pembayaran alat besar (excavator mini) belum tersusun disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan lalai dalam menyusun jadwal	9	Tinggi	Mitigasi	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan	3	2	6
RSK MJ 40	Pemeliharaan peralatan dan mesin tidak terkontrol disebabkan oleh Pengurus barang tidak mencatat BMD yang perlu dilakukan pemeliharaan sesuai KIB	9	Tinggi	Mitigasi	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan	3	2	6
RSK MJ 41	Belum tersusunnya rincian kebutuhan unit dan biaya yang diperlukan dalam rangka Pemeliharaan dan Rehabilitasi Aset Tetap lainnya (LPJU) disebabkan oleh Pejabat Fungsional Pelaksana yang menangani Pemeliharaan dan Rehabilitasi belum melakukan survei kondisi faktual dan biaya yang diperlukan untuk memelihara/merehabilitasi kerusakan Aset Tetap lainnya (LPJU)	9	Tinggi	Mitigasi	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan Aset Tetap lainnya (LPJU) agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan Aset Tetap lainnya (LPJU)	3	2	6
RSK MJ 42	Belum tersusunnya rincian kebutuhan unit dan biaya yang diperlukan dalam rangka Pemeliharaan dan Rehabilitasi	9	Tinggi	Mitigasi	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan	3	2	6



	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya disebabkan oleh Pejabat Fungsional Pelaksana yang menangani Pemeliharaan dan Rehabilitasi belum melakukan survei kondisi faktual dan biaya yang diperlukan untuk memelihara/merehabilitasi kerusakan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				rencana aksi pemeliharaan kendaraan			
RP MJ 02	Tidak semua pengajuan pelayanan perijinan dan non perijinan ditindaklanjuti disebabkan Dokumen pengajuan tidak lengkap sesuai SOP	9	Sedang	Mitigasi	Sosialisasi terkait Standar dan Syarat syarat pelayanan	2	2	4
RP MJ 03	kegiatan yang tidak sesuai dengan target prioritas disebabkan ketersediaan data dan informasi yang kurang valid	9	Sedang	Mitigasi	Verifikasi ulang data dan informasi yang ada	2	2	4
RK MJ 09	Tidak terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintrah yang tidak dilaksanakan Unit Kerja Lainnya disebabkan oleh Kurangnya koordinasi dengan Instansi Vertikal Terkait	12	Sangat Tinggi	Mitigasi	Mengadakan Koordinasi dan Rapat Kerja	3	2	6
RSK MJ 43	Koordinasi/sinergi lintas sektoral idak maksimal disebabkan oleh Kurangnya koordinasi/sinergi dengan instansi vertikal	9	Tinggi	Mitigasi	Meningkatkan koordinasi antara kecamatan dengan instansi vertikal	3	2	6
RSK MJ 44	Kegiatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhambat disebabkan oleh Anggaran berkurang karena adanya efisiensi belanja	4	Rendah	Mitigasi	Intruksi camat kepada Pelaksana Kegiatan untuk memilih belanja-belanja yang prioritas	2	2	4
RK MJ 10	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Camat Tidak Terlaksana Dengan Baik disebabkan oleh Tidak Ada	9	Tinggi	Mitigasi	Melakukan Koordinasi dan Evaluasi kegiatan	3	2	6



	Sosialisasi Kegiatan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Camat							
RSK MJ 45	Belum maksimalnya Pengelolaan Sampah Kecamatan disebabkan oleh 1. SDM dan sarana prasarana pengelolaan sampah kurang; 2. Rendahnya kesadaran masyarakat atas tatacara pembuangan sampah di TPS	4	Rendah	Mitigasi	Sosialisasi Kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas pengelola bank sampah	2	2	4
RSK MJ 46	Belum optimalnya Pemeliharaan LPJU di 8 Kelurahan disebabkan oleh Jumlah anggaran tidak sesuai dengan jumlah LPJU jalan pemukiman yang membutuhkan pemeliharaan	4	Rendah	Mitigasi	Penetapan pemeliharaan LPJU berdasarkan skala prioritas	2	2	4
RSK MJ 47	Pelatihan Service Excellent bagi Petugas PATEN Kecamatan dan Kelurahan tidak terlaksana disebabkan oleh Efisiensi anggaran sehingga berkurangnya / dihapuskannya alokasi anggaran untuk pelaksanaan bimtek	4	Rendah	Mitigasi	Rasionalisasi peserta bimtek berdasarkan ketersediaan anggaran	2	2	4
RSK MJ 48	Tidak optimalnya penyaluran bantuan bagi korban bencana disebabkan oleh 1. Kejadian dan Jumlah korban bencana yang tidak dapat diprediksi; 2. Keterbatasan anggaran	9	Tinggi	Mitigasi	1. Optimalisasi data korban bencana agar penyaluran bantuan tepat; 2. Kerjasama dengan masyarakat dan CSR dalam pemberian bantuan bagi korban bencana	3	2	6
RSK MJ 49	Volume dan kualitas pekerjaan kurang disebabkan oleh pelaksana pekerjaan tidak sesuai RAB	4	Rendah	Mitigasi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh PPKom, PPTK, dan Konsultan Pengawasan	2	2	4
RSK MJ 50	Volume dan kualitas pekerjaan kurang disebabkan oleh pelaksana pekerjaan tidak sesuai RAB	4	Rendah	Mitigasi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh PPKom, PPTK, dan Konsultan Pengawasan	2	2	4
RSK MJ 51	Volume dan kualitas pekerjaan kurang disebabkan oleh pelaksana pekerjaan tidak sesuai RAB	4	Rendah	Mitigasi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh PPKom, PPTK, dan Konsultan Pengawasan	2	2	4



RSK MJ 52	Volume dan kualitas pekerjaan kurang disebabkan oleh pelaksana pekerjaan tidak sesuai RAB	4	Rendah	Mitigasi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh PPKom, PPTK, dan Konsultan Pengawasan	2	2	4
RSK MJ 53	Volume dan kualitas pekerjaan kurang disebabkan oleh pelaksana pekerjaan tidak sesuai RAB	4	Rendah	Mitigasi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh PPKom, PPTK, dan Konsultan Pengawasan	2	2	4
RSK MJ 54	Volume dan kualitas pekerjaan kurang disebabkan oleh pelaksana pekerjaan tidak sesuai RAB	4	Rendah	Mitigasi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh PPKom, PPTK, dan Konsultan Pengawasan	2	2	4
RP MJ 04	Alokasi anggaran yang kurang disebabkan Terdapat Kegiatan Lembaga yang di luar dari perencanaan anggaran	8	Sedang	Mitigasi	Menyusun Kembali Prioritas Kegiatan	2	2	4
RK MJ 11	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tidak maksimal disebabkan oleh Kesadaran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan masih rendah	12	Sangat Tinggi	Mitigasi	Monitoring dan evaluasi	3	3	9
RSK MJ 55	Tidak tersampainya undangan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan kepada Masyarakat disebabkan oleh Undangan tidak tersampaikan secara langsung kepada pihak yang diundang	9	Tinggi	Mitigasi	Instruksi Camat Kepada Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa agar lebih aktif melakukan koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan	3	2	6
RSK MJ 56	Keterlambatan/tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan Bupati Cup disebabkan oleh 1. Proses penyediaan anggaran (DPA) terlambat karena adanya efisiensi anggaran; 2. Penyediaan barang/jasa terlambat dilaksanakan; 3. Kurangnya koordinasi dengan Komite Olahraga Kecamatan Muara Jawa	9	Tinggi	Mitigasi	Instruksi Camat Kepada Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa agar lebih aktif melakukan koordinasi dengan KOK Muara Jawa	3	2	6
RSK MJ 57	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tidak terlaksana tepat waktu	12	Sangat Tinggi	Mitigasi	Instruksi Camat Kepada Kasi PMD Kecamatan dan seluruh Lurah agar segera	3	2	6



	disebabkan oleh 1. Keterlambatan proses pemilihan penyedia karena PPBJ dan calon penyedia terbatas; 2. Kelangkaan material;				melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan kegiatan			
RSK MJ 58	Ketidaksiapan Kecamatan Muara Jawa dan Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan disebabkan oleh Efisiensi anggaran	12	Sangat Tinggi	Mitigasi	Instruksi Camat kepada Kasi PMD Kecamatan dan seluruh Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan dengan mengoptimalkan anggaran setelah efisiensi	3	3	9
RSK MJ 59	Terdapat kelurahan yang tidak mengikuti Lomba Kelurahan disebabkan oleh Ketidaksiapan Kelurahan dalam memenuhi syarat-syarat penilaian Lomba Kelurahan	12	Sangat Tinggi	Mitigasi	Instruksi Camat kepada seluruh Kelurahan untuk mengikuti kegiatan Evaluasi/Lomba Kelurahan	2	2	4
RSK MJ 60	Ketidaksiapan anggaran untuk mengikuti kegiatan disebabkan oleh Efisiensi anggaran	12	Sangat Tinggi	Mitigasi	1. Penunjukan Kelurahan yang siap mewakili; 2. Optimalisasi anggaran yang tersedia setelah proses efisiensi	2	2	4
RK MJ 12	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tidak maksimal disebabkan oleh Kesadaran Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Dalam Kegiatan Pemberdayaan masih rendah	12	Sangat Tinggi	Mitigasi	Melakukan Rapat Kerja dan Monitoring ke Lapangan	3	2	6
RSK MJ 61	Terdapat lembaga kemasyarakatan yang tidak melaksanakan kegiatan disebabkan oleh 1. Kepengurusan tidak aktif; 2. Efisiensi anggaran; 3. Jadwal kegiatan tidak sesuai anggaran kas	9	Tinggi	Mitigasi	1. Instruksi Camat Kepada PPTK agar proaktif melakukan koordinasi kegiatan; 2. Instruksi Camat kepada Lurah untuk segera melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program pembangunan berbasis RT di setiap Kelurahan	3	2	6
RSK MJ 62	Tidak terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan disebabkan oleh 1.	9	Tinggi	Mitigasi	Instruksi Camat Kepada Kasi Trantib agar proaktif melakukan koordinasi kegiatan	3	2	6



	Kepengurusan tidak aktif; 2. Efisiensi anggaran; 3. Jadwal kegiatan tidak sesuai anggaran kas							
RP MJ 05	Tidak maksimalnya Kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan disebabkan oleh Kurangnya Koordinasi Antara Pimpinan Kecamatan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	Sedang Tinggi	Mitigasi	Camat Menginstruksikan Kepada Kasi Trantib Untuk Mengagendakan Jadwal dan Rencana Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Bersama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.	3	3	9
RK MJ 13	Setiap unsur Muspika menjalankan upaya penyelenggaraan trantib secara terpisah disebabkan oleh Kurangnya koordinasi lintas sektoral	12	Sangat Tinggi	Mitigasi	Koordinasi lintas sektoral dan pembentukan tim kerja bersama	3	3	9
RSK MJ 63	Keterlambatan/tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan disebabkan oleh 1. Proses penyediaan anggaran (DPA) terlambat karena adanya efisiensi anggaran; 2. Penyediaan barang/jasa terlambat dilaksanakan; 3. Kurangnya koordinasi dengan Tomag dan Tomas	12	Sangat Tinggi	Mitigasi	Koordinasi / Rapat kerja dengan Tomas dan Tomag	3	3	9
RP MJ 06	Masih rendahnya kompetensi SDM petugas pelayanan umum dalam menjalankan fungsi pelayanan disebabkan oleh Kurangnya pemahaman terhadap SOP Pelayanan	10	Sedang	Mitigasi	1. Instruksi Camat kepada seluruh aparaturnya untuk bekerja sesuai SOP; 2. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan; 3. Peningkatan kualitas	2	1	2



					SDM melalui bimtek/diklat			
RK MJ 14	Kegiatan Urusan Pemerintahan Tidak Terlaksana Seluruhnya disebabkan oleh Penjadwalan Pelaksanaan Kegiatan Yang Kurang Matang	12	Sangat Tinggi	Mitigasi	Melakukan Rapat Kerja dan Monitoring ke Lapangan	2	2	4
RSK MJ 64	Ketidaksiapan Kecamatan Muara Jawa dan Kelurahan untuk mengikuti kegiatan disebabkan oleh Jadwal kegiatan yang belum tentu sehingga tidak sesuai dengan anggaran kas	12	Sangat Tinggi	Mitigasi	1. Koordinasi dengan Setkab terkait jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat kerja Sekretariat LPTQ Kecamatan Muara Jawa	2	2	4



e. Pemetaan Penanganan Risiko Program dan Kegiatan

Gambar

Matriks Pemetaan Penanganan Risiko Program dan Kegiatan

Matriks Peta Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Dampak					

Ket.

sebelum penanganan Risiko

A = RSKMJ09, RSKMJ10, RSKMJ11, RSKMJ12, RSKMJ13, RSKMJ14

B = RKMJ04, RKMJ05

Setelah penanganan Risiko

D = RKMJ04, RSKMJ09, RSKMJ10, RKMJ05, RSKMJ11, RSKMJ12, RSKMJ13, RSKMJ14



Respon dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Program dan Kegiatan Eselon I sesuai dengan tabel berikut:

Tabel
Rencana Tindak Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan/sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Respon Risiko (Diterima/mitigasi, dihindari dan ditransfer)	Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Target Waktu (Rencana Jadwal RTP)	Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)
RP MJ 01	Tidak Lengkapnya Data Pendukung Yang Digunakan Dalam Penilaian SAKIP disebabkan kurangnya pemahaman pengampu dalam memenuhi data pendukung	Mitigasi	Mengadakan PKS (Pelatihan Kantor Sendiri) terkait pemenuhan dokumen SAKIP pada seluruh Pegawai	Mei s/d Desember	1. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. Kasubag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
RK MJ 01	Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Terlambat Dibuat disebabkan oleh Tidak Lengkapnya Data Yang Dibutuhkan	Mitigasi	Monitoring Rencana Kerja, Laporan Evaluasi Kinerja Masing-masing Kasi dan Kasubbag Disampaikan Tepat Waktu Setiap Bulan	Maret s/d Desember	Sekretaris Camat
RSK MJ 01	Data rincian kebutuhan dan anggaran (Sub Kegiatan) yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah belum tersusun dengan optimal disebabkan oleh Pejabat Pelaksana belum mengidentifikasi kebutuhan Barang /Jasa dan anggaran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya	Mitigasi	Instruksi Camat kepada seluruh pejabat struktural dan pelaksana kegiatan untuk menginventarisir rincian kebutuhan dan biaya yang diperlukan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan disampaikan kepada kasubag program dan keuangan	Maret-April, Juli-Agustus	Kasubag Penyusunan Program dan keuangan & PPTK
RSK MJ 02	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran terhambat karena Aplikasi dan sistem kadang terganggu pada saat login Aplikasi disebabkan oleh Jaringan telekomunikasi kurang stabil	Mitigasi	Instruksi Camat agar memantau dan Monitoring Sistem dan Aplikasi sehingga Penyusunan DPA dapat segera tersusun	Maret, April, Oktober, November	Kasubag Penyusunan Program dan Camat
RSK MJ 03	Dokumen Perubahan tidak dapat tersaji secara tepat waktu karena keterbatasan waktu penyusunan Dokumen disebabkan oleh Terbatasnya waktu yang diberikan dalam penyusunan Dokumen Anggaran Perubahan SKPD	Mitigasi	Instruksi Camat kepada Pelaksana Penyusunan Program dan Keuangan agar segera menyusun Dokumen DPA secepat mungkin sehingga dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan	Juni-September	Kasubag Penyusunan Program dan Camat



RSK MJ 04	Data Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja terlambat disampaikan Pejabat Pelaksana kepada Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan disebabkan oleh Pelaksana kegiatan tidak membuat laporan progres capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan	Mitigsi	Instruksi Camat kepada Pelaksana kegiatan agar Data Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja disampaikan tepat waktu kepada Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	Januari-Desember	Kasubag Penyusunan Program dan keuangan & Pengampu Kegiatan/Subkegiatan/Paket pekerjaan
RSK MJ 05	Data capaian kinerja terlambat disampaikan oleh Pejabat Pelaksana kepada Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan disebabkan oleh Pelaksana kegiatan tidak membuat laporan progres capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan	Mitigsi	Instruksi Camat kepada Pelaksana kegiatan agar Data Capaian Kinerja disampaikan tepat waktu kepada Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan agar dapat disusun Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember	Kasubag Penyusunan Program dan keuangan & Pengampu Kegiatan/Subkegiatan/Paket pekerjaan
RSK MJ 06	Data Statistik Sektoral yang disampaikan tidak relevan disebabkan oleh Pelaksana kegiatan tidak memahami cara mengumpulkan dan menyampaikan data	Mitigsi	Koordinasi dengan Bappeda selaku OPD serta melakukan pendampingan kepada [etugas pengumpul dan penginput data	April - Desember	Sekretaris Camat
RSK MJ 07	Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah disebabkan oleh Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tidak dihadiri	Mitigsi	Penunjukan personil untuk menghadiri Forum PD	Maret - April	Kasi PMD dan Kasubag Penyusunan Program & Keuangan
RK MJ 02	Dokumen Administrasi Keuangan Yang Dibuat Tidak Valid disebabkan oleh Tidak Lengkapnya Data Yang Dibutuhkan	Mitigsi	Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi Laporan Administrasi Keuangan Oleh Atasan Langsung Sebelum Disampaikan	Januari s/d Desember	Sekretaris Camat
RSK MJ 08	Kurangnya anggaran gaji dan tunjangan disebabkan oleh 1. Perubahan nilai gaji karena Berubahnya data pegawai baik karena kenaikan pangkat/KGB/bertambahnya anggota keluarga yang ditunjang; 2. Ketidaktepatan dalam menyusun skema anggaran kas bulanan; 3. Perubahan peraturan dasar dalam perhitungan gaji/BPJS/Pajak penghasilan	Mitigsi	1. Permohonan pergeseran anggaran kas gaji dan tunjangan; 2. Permohonan pergeseran pagu antar rekening gaji dan tunjangan; 3. Permohonan pertambahan pagu gaji dan tunjangan	Januari s/d Desember	Kasubag Penyusunan Program dan keuangan
RSK MJ 09	Belum sinkronnya data Keuangan dan Aset pada saat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun disebabkan oleh Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak melaksanakan rekonsiliasi data barang dan data keuangan secara rutin	Mitigsi	Instruksi Camat kepada Pengurus barang dan pejabat penatausahaan keuangan agar melaksanakan rekonsiliasi data barang dan data keuangan secara rutin	Januari dan Desember	Sekretaris, dan Kasubag Penyusunan Program dan keuangan
RSK MJ 10	Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran belum disusun	Mitigsi	Instruksi Camat kepada pelaksana kegiatan untuk membuat rekapitulasi/laporan realisasi pembayaran tepat waktu	Januari s/d Desember	Sekretaris, dan Kasubag Penyusunan Program dan keuangan



	sesuai dengan realisasi pelaksanaan kegiatan disebabkan oleh Pelaksana kegiatan belum membuat rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan				
RSK MJ 11	Belum sinkronnya data Keuangan dan Aset pada saat Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Semester 1 dan Prognosis Semester 2 disebabkan oleh Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak melaksanakan rekonsiliasi data barang dan data keuangan secara rutin	Mitigasi	Instruksi Camat kepada pelaksana kegiatan untuk membuat rekapitulasi/laporan realisasi pembayaran tepat waktu	Juni	Sekretaris, dan Kasubag Penyusunan Program dan keuangan
RK MJ 03	Barang Milik Daerah Tidak Teradministrasi Dengan Lengkap disebabkan Tidak Lengkapnya Dokumen Pengadaan dan Dokumen Pendukung	Mitigasi	Pengurus Barang Melakukan Pemeriksaan Kesesuaian Dokumen dan Barang Sebelum Dilakukan Pencatatan	Januari s/d Desember	Sekretaris Camat
RSK MJ 12	Perkiraan Kebutuhan yang Tidak Akurat disebabkan Penyusunan kebutuhan barang tidak berdasarkan data yang akurat dan analisis yang cermat	Mitigasi	Pejabat penatausahaan BMD dan Pengurus Barang mengumpulkan data-data RKBMD/RKPBMD dari setiap Kelurahan serta Bagian-bagian di Kecamatan dan melakukan verifikasi atas usulan-usulan tersebut	Januari s/d Desember	Kasubag Umum, Tatalaksana dan Kepegawaian, PPTK
RSK MJ 13	Pengurus barang tidak mendokumentasikan dan menginput hasil pelaksanaan PBJ kedalam sistem aplikasi SIMDA disebabkan oleh Pengurus barang tidak memperoleh data secara rinci yang diperlukan dalam pencatatan dan pendokumentasian dari pelaksana PBJ	mitigasi	Nota Dinas dari Camat Kepada Pelaksana Kegiatan PBJ dan PPKom agar menyampaikan data dan informasi secara lengkap kepada pengurus barang, dan pengurus barang melakukan pencatatan dan pendokumentasian hasil PBJ dengan baik	Mei	Sekretaris, Kasubag Umum Ketatalaksanaan dan kepegawaian
RSK MJ 14	Barang Milik Daerah tidak dapat diketahui nilai wajarnya disebabkan oleh Banyak BMD yang umur barang yang sudah melebihi umur ekonomisnya, kerusakan, atau karena alasan force majeure (kecelakaan atau kejadian tak terduga) namun masih tercatat di neraca SKPD dengan nilai yang tinggi	Mitigasi	Koordinasi/Pendampingan dengan BPKAD Bidang Aset untuk melakukan penilaian atas nilai BMD Kecamatan Muara Jawa	Januari s/d Desember	Sekretaris, Kasubag Umum Ketatalaksanaan dan kepegawaian
RSK MJ 15	Data barang milik daerah dengan fisik barang yang ada tidak sesuai disebabkan oleh Pengurus barang kurang teliti dan cermat dalam memeriksa barang hasil pengadaan yang dilaksanakan oleh PPKom ketika barang diserahkan	Mitigasi	Nota Dinas Camat kepada pengurus barang agar teliti dan cermat dalam memeriksa barang hasil pengadaan yang dilaksanakan oleh PPKom ketika barang diserahkan	Mei	Sekretaris, Kasubag Umum Ketatalaksanaan dan kepegawaian
RK MJ 04	Data Pegawai Tidak Teradministrasi Dengan Lengkap disebabkan oleh Masih terdapat beberapa Pegawai yang belum menginput data kepegawaian di Aplikasi SIMPEG	Mitigasi	Evaluasi Sumber Daya Manusia yang ada sebelum pelaksanaan kegiatan	Januari s/d Desember	Sekretaris Camat



RSK MJ 16	Keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang disebabkan oleh Proses pemilihan penyedia barang yang terlambat dilaksanakan	Mitigsi	Instruksi Camat kepada Kasubag Umum ketatalaksanaan dan kepegawaian selaku PPTK untuk segera berproses	TW3 dan TW4	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
RSK MJ 17	Pendidikan dan Pelatihan tidak terlaksana disebabkan oleh Kesulitan dalam pemenuhan materi dan narasumber yang kompeten	Diterima	Instruksi Camat kepada Kasubag Umum ketatalaksanaan dan kepegawaian untuk berkoordinasi dengan BKPSDM terkait dengan kegiatan Diklat	TW3 dan TW4	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
RSK MJ 18	Kurangnya Sosialisasi Peraturan Perundangan undangan disebabkan oleh Minimnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan	Diterima	Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	TW 3 dan 4	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
RSK MJ 19	Kurangnya Implementasi peraturan perundang-undangan ASN disebabkan oleh Kurang pemahaman terakit Peraturan Perundang-undangan	Diterima	Melakukan bimtek, sosialisasi melalui website dan media sosial	TW 3 dan 4	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
RK MJ 05	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tidak sesuai kebutuhan disebabkan oleh Kurangnya Sumber Daya Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mitigsi	Evaluasi Sumber Daya Manuasia yang ada sebelum peaksanaan kegiatan	Januari s/d Agustus , Oktober	Sekretaris Camat
RSK MJ 20	Aliran listrik mengalami gangguan disebabkan oleh Instalasi listrik bermasalah	Diterima	Penyiapan komponen listrik sesuai kebutuhan	TW 2, TW 3, TW 4	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
RSK MJ 21	Penyediaan ATK tidak tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	Diterima	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	TW 2, TW 3, TW 4	Kepala Sub.Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
RSK MJ 22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tidak tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	Diterima	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	TW 2, TW 3, TW 4	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
RSK MJ 23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	Diterima	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	TW 2, TW 3, TW 4	PPTK (IFNI HANIFAH GANI)
RSK MJ 24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tidak tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	Diterima	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	TW 2, TW 3, TW 4	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
RSK MJ 25	Penyediaan Bahan/Material tidak tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami	Diterima	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	TW 2, TW 3, TW 4	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian



	efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan				
RSK MJ 26	Kunjungan tamu tidak dapat difasilitasi tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	Diterima	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	TW 2, TW 3, TW 4	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
RSK MJ 27	Pembayaran biaya perjalanan dinas tidak dapat dibayarkan tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	Diterima	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	TW 2, TW 3, TW 4	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
RSK MJ 28	Barang-barang yang dibutuhkan dalam kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD tidak dapat disediakan tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	Diterima	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	TW 2, TW 3, TW 4	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
RSK MJ 29	Pemeliharaan server tidak tepat waktu disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	Diterima	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	TW 2, TW 3, TW 4	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
RK MJ 06	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Tertunda disebabkan oleh Kekurangan/ketidakterediaan anggaran	Mitigsi	Monitoring Dan Efisiensi Waktu Penyelesaian	Januari s/d Desember	Sekretaris Camat
RSK MJ 30	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak terlaksana disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi	Mitigsi	Usulan untuk mengembalikan pagu anggaran di APBD-Perubahan	TW 2, TW 3, TW 4	PPTK (IFNI HANIFAH GANI)
RSK MJ 31	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terlaksana disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	Mitigsi	Instruksi Camat kepada Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian untuk melakukan penyesuaian kebutuhan anggaran dengan sisa anggaran yang tersedia	TW 2, TW 3, TW 4	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
RSK MJ 32	Pengadaan Mebel tidak terlaksana disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	Mitigsi	Instruksi Camat kepada Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian untuk melakukan penyesuaian kebutuhan anggaran dengan sisa anggaran yang tersedia	TW 2, TW 3, TW 4	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
RSK MJ 33	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak terlaksana disebabkan oleh Anggaran mengalami efisiensi/rasionalisasi, SPD belum tersedia, proses pemilihan penyedia belum dilaksanakan	Mitigsi	Instruksi Camat kepada Kasi PMD untuk melakukan penyesuaian kebutuhan anggaran dengan sisa anggaran yang tersedia	TW 2, TW 3, TW 4	Kasi PMD



RK MJ 07	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Tertunda disebabkan oleh Waktu Penyelesaian Tidak Cukup	Mitigsi	Monitoring Dan Efisiensi Waktu Penyelesaian	Januari s/d Desember	Sekretaris Camat
RSK MJ 34	Tidak cukupnya anggaran Jasa Surat Menyurat disebabkan oleh Alokasi anggaran yang disiapkan tidak sesuai kebutuhan	Diterima	Menambah anggaran yang di butuhkan	TW3	PPTK (HATMAH)
RSK MJ 35	Alokasi dana yang disiapkan tidak mencukupi untuk pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik disebabkan oleh Petugas Pelaksana yang menghitung kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik pada tahun 2023	Mitigasi	Mengalokasikan/ menyediakana anggaran tambahan kegiatan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	TW 3	PPTK (HATMAH)
RSK MJ 36	Petugas kurang teliti dalam perhitungan gaji Non ASN disebabkan oleh Adanya kesalahan penginputan nilai nominal gaji non ASN	Mitigasi	Instruksi Kepala Dinas kepada Sekretaris dan Kasubbag Kepegawaian beserta Petugas agar cermat dalam melaukan penginputan nilai nominal gaji non ASN	Januari s/d Desember	PPTK (HATMAH)
RK MJ 08	Aset BMD Tidak Terpelihara disebabkan oleh Lemahya Pengawasan Dan Tidak Adanya Lembar Control Aset Yang Dipelihara	Mitigsi	Membuat Lembar Control Penjagaan Perawatan Aset	Maret, April, Mei, Juli s/d Oktober	Sekretaris Camat
RSK MJ 37	Jadwal pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan jabatan belum tersusun disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan lalai dalam menyusun jadwal	Mitigsi	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan	April - Desember	PPTK (IFNI HANIFAH GANI) dan Kepala Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian
RSK MJ 38	Jadwal pemeliharaan dan pembayaran pajak setiap unit kendaraan Operasional atau Lapangan belum tersusun disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan Operasional atau Lapangan lalai dalam menyusun jadwal	Mitigsi	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan	April - Desember	PPTK (IFNI HANIFAH GANI) dan Kepala Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian
RSK MJ 39	Jadwal pemeliharaan dan pembayaran alat besar (excavator mini) belum tersusun disebabkan oleh Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan lalai dalam menyusun jadwal	Mitigsi	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan	April - Desember	PPTK (IFNI HANIFAH GANI) dan Kepala Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian
RSK MJ 40	Pemeliharaan peralatan dan mesin tidak terkontrol disebabkan oleh Pengurus barang tidak mencatat BMD yang perlu dilakukan pemeliharaan sesuai KIB	Mitigsi	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan	April - Desember	PPTK (IFNI HANIFAH GANI) dan Kepala Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian
RSK MJ 41	Belum tersusunnya rincian kebutuhan unit dan biaya yang diperlukan dalam rangka Pemeliharaan dan Rehabilitasi Aset Tetap lainnya (LPJU) disebabkan oleh Pejabat Fungsional Pelaksana yang menangani Pemeliharaan dan Rehabilitasi belum melakukan survei kondisi faktual dan biaya yang diperlukan untuk	Mitigsi	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan Aset Tetap lainnya (LPJU) agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan Aset Tetap lainnya (LPJU)	April - Desember	PPTK (IFNI HANIFAH GANI) dan Kepala Sub Bagian Umum , Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian



	memelihara/merehabilitasi kerusakan Aset Tetap lainnya (LPJU)				
RSK MJ 42	Belum tersusunnya rincian kebutuhan unit dan biaya yang diperlukan dalam rangka Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya disebabkan oleh Pejabat Fungsional Pelaksana yang menangani Pemeliharaan dan Rehabilitasi belum melakukan survei kondisi faktual dan biaya yang diperlukan untuk memelihara/merehabilitasi kerusakan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mitigasi	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan	April - Desember	PPTK (IFNI HANIFAH GANI) dan Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian
RP MJ 02	Tidak semua pengajuan pelayanan perijinan dan non perijinan ditindaklanjuti disebabkan Dokumen pengajuan tidak lengkap sesuai SOP	Mitigasi	Sosialisasi terkait Standar dan Syarat syarat pelayanan	April -s/d Juni	1. Kasi Pelayanan Umum; 2. Kasi Pemerintahan; 3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa; 4. Kasi Trantib; 5. Kasi Kessos
RP MJ 03	kegiatan yang tidak sesuai dengan target prioritas disebabkan ketersediaan data dan informasi yang kurang valid	Mitigasi	Verifikasi ulang data dan informasi yang ada	Mei s/d Desember	1. Kasi Pelayanan Umum; 2. Kasi Pemerintahan; 3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa; 4. Kasi Trantib; 5. Kasi Kessos
RK MJ 09	Tidak terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintrah yang tidak dilaksanakan Unit Kerja Lainnya disebabkan oleh Kurangnya koordinasi dengan Instansi Vertikal Terkait	Mitigasi	Mengadakan Koordinasi dan Rapat Kerja	Maret, Juni, s/d Oktober	Camat
RSK MJ 43	Koordinasi/sinergi lintas sektoral idak maksimal disebabkan oleh Kurangnya koordinasi/sinergi dengan instansi vertikal	Mitigasi	Meningkatkan koordinasi antara kecamatan dengan instansi vertikal	Maret, Juni, s/d Oktober	PPTK (EDY KASianto.S S.Pd)
RSK MJ 44	Kegiatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhambat disebabkan oleh Anggaran berkurang karena adanya efisiensi belanja	Mitigasi	Intruksi camat kepada Pelaksana Kegiatan untuk memilih belanja-belanja yang prioritas	Februari-Maret	PPTK (IFNI HANIFAH GANI) dan Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan
RK MJ 10	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Camat Tidak Terlaksana Dengan Baik disebabkan oleh Tidak Ada Sosialisasi Kegiatan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Camat	Mitigasi	Melakukan Koordinasi dan Evaluasi kegitan	Pebruai s/d Mei, Juli, Agustus, Oktober	Kasi Pelayanan Umum dan Kasi PMD



BerAKHLAK
Berakhlak Berkompromi
Berakhlak Berkeadilan



BerAKHLAK
Berakhlak Berkompromis
Berakhlak Berkeadilan



	Kepengurusan tidak aktif; 2. Efisiensi anggaran; 3. Jadwal kegiatan tidak sesuai anggaran kas				
RP MJ 05	Tidak maksimalnya Kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan disebabkan oleh Kurangnya Koordinasi Antara Pimpinan Kecamatan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Mitigasi	Camat Menginstruksikan Kepada Kasi Trantib Untuk Mengagendakan Jadwal dan Rencana Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Bersama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.	Per Triwulan	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
RK MJ 13	Setiap unsur Muspika menjalankan upaya penyelenggaraan trantib secara terpisah disebabkan oleh Kurangnya koordinasi lintas sektoral	Mitigasi	Koordinasi lintas sektoral dan pembentukan tim kerja bersama	TW 1, TW 2, TW 3, TW 4	Sekretaris Camat
RSK MJ 63	Keterlambatan/tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan disebabkan oleh 1. Proses penyediaan anggaran (DPA) terlambat karena adanya efisiensi anggaran; 2. Penyediaan barang/jasa terlambat dilaksanakan; 3. Kurangnya koordinasi dengan Tomag dan Tomas	Mitigasi	Koordinasi / Rapat kerja dengan Tomas dan Tomag	TW 1, TW 2, TW 3, TW 4	Kasi Trantib
RP MJ 06	Masih rendahnya kompetensi SDM petugas pelayanan umum dalam menjalankan fungsi pelayanan disebabkan oleh Kurangnya pemahaman terhadap SOP Pelayanan	Mitigasi	1. Instruksi Camat kepada seluruh aparatur untuk bekerja sesuai SOP; 2. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan; 3. Peningkatan kualitas SDM melalui bimtek/diklat	1 Tahun	Semua Kasi dan Kasubag
RK MJ 14	Kegiatan Urusan Pemerintahan Tidak Terlaksana Seluruhnya disebabkan oleh Penjadwalan Pelaksanaan Kegiatan Yang Kurang Matang	Mitigasi	Melakukan Rapat Kerja dan Monitoring ke Lapangan	Jan sd November	Sekretaris Camat
RSK MJ 64	Ketidaksiapan Kecamatan Muara Jawa dan Kelurahan untuk mengikuti kegiatan disebabkan oleh Jadwal kegiatan yang belum tentu sehingga tidak sesuai dengan anggaran kas	Mitigasi	1. Koordinasi dengan Setkab terkait jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat kerja Sekretariat LPTQ Kecamatan Muara Jawa	Jan sd November	Sekretaris Camat dan PPTK (IFNI HANIFAH GANI)



g. Pemantauan Risiko

Pemantauan Pelaksanaan Rencana Tidak Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan sesuai Tabel berikut:

Tabel
Pemantauan RTP Risiko Program dan Kegiatan Eselon IV

Kode Risiko	Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RP MJ 01	Mengadakan PKS (Pelatihan Kantor Sendiri) terkait pemenuhan dokumen SAKIP pada seluruh Pengawai													1. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. Kasubag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	CAMAT
RK MJ 01	Monitoring Rencana Kerja, Laporan Evaluasi Kinerja Masing-masing Kasi dan Kasubag Disampaikan Tepat Waktu Setiap Bulan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretaris Camat	CAMAT



RSK MJ 01	Instruksi Camat kepada seluruh pejabat struktural dan pelaksana kegiatan untuk menginventarisir rincian kebutuhan dan biaya yang diperlukan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan disampaikan kepada kasubag program dan keuangan			√	√				√	√				Kasubag Penyusunan Program dan keuangan & PPTK	CAMAT
					√	√									
RSK MJ 02	Instruksi Camat agar memantau dan Monitoring Sistem dan Aplikasi sehingga Penyusunan DPA dapat segera tersusun			√	√						√	√		Kasubag Penyusunan Program dan Camat	CAMAT
			√												
RSK MJ 03	Instruksi Camat kepada Pelaksana Penyusunan Program dan Keuangan agar segera menyusun Dokumen DPA secepat mungkin sehingga dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan						√	√	√	√				Kasubag Penyusunan Program dan Camat	CAMAT
RSK MJ 04	Instruksi Camat kepada Pelaksana kegiatan agar Data Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja disampaikan tepat waktu kepada Kasubag	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubag Penyusunan Program dan keuangan & Pengampu Kegiatan/Subkegiatan/Paket pekerjaan	CAMAT



	Penyusunan Program dan Keuangan	√		√													
RSK MJ 05	Instruksi Camat kepada Pelaksana kegiatan agar Data Capaian Kinerja disampaikan tepat waktu kepada Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan agar dapat disusun Laporan Evaluasi Perangkat Daerah			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Kasubag Penyusunan Program dan keuangan & Pengampu Kegiatan/Subkegiatan/Paket pekerjaan	CAMAT
				√		√											
RSK MJ 06	Koordinasi dengan Bappeda selaku OPD serta melakukan pendampingan kepada [etugas pengumpul dan penginput data				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Sekretaris Camat	CAMAT
RSK MJ 07	Penunjukan personil untuk menghadiri Forum PD			√	√											Kasi PMD dan Kasubag Penyusunan Program & Keuangan	CAMAT
RK MJ 02	Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi Laporan Administrasi Keuangan Oleh Atasan Langsung Sebelum Disampaikan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Sekretaris Camat	CAMAT
		√	√	√													



BerAKHLAK
Berakhlak Baik dengan Rukun Islam dan Rukun Negara
Berakhlak Baik dengan Rukun Islam dan Rukun Negara



RK MJ 03	Pengurus Barang Melakukan Pemeriksaan Kesesuaian Dokumen dan Barang Sebelum Dilakukan Pencatatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretaris Camat	CAMAT
RSK MJ 12	Pejabat penatausahaan BMD dan Pengurus Barang mengumpulkan data-data RKBMD/RKPBMD dari setiap Kelurahan serta Bagian-bagian di Kecamatan dan melakukan verifikasi atas usulan-usulan tersebut	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubbag Umum, Tatalaksana dan Kepegawaian,PPTK	CAMAT
RSK MJ 13	Nota Dinas dari Camat Kepada Pelaksana Kegiatan PBJ dan PPKom agar menyampaikan data dan infromasi secara lengkap kepada pungurus barang, dan pengurus barang melakukan pencatatan dan pendokumentasian hasil PBJ dengan baik					√								Kasubbag Umum, Tatalaksana dan Kepegawaian,PPTK	CAMAT
RSK MJ 14	Koordinasi/Pendampingan dengan BPKAD Bidang Aset untuk melakukan penilaian atas nilai BMD Kecamatan Muara Jawa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	SekCam dan Kasubbag UMTAPEG	CAMAT



RSK MJ 15	Nota Dinas Camat kepada pengurus barang agar teliti dan cermat dalam memeriksa barang hasil pengadaan yang dilaksanakan oleh Ppkom ketika barang diserahkan terimakan					√								Sekretaris, Kasubag Umum Ketatalaksanaan dan kepegawaian	CAMAT
RK MJ 04	Evaluasi Sumber Daya Manuasia yang ada sebelum peakaksanaan kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretaris Kecamatan	CAMAT
RSK MJ 16	Instruksi Camat kepada Kasubag Umum ketatalaksanaan dan kepegawaian selaku PPTK untuk segera berproses						√	√	√	√	√	√		Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	CAMAT
RSK MJ 17	Instruksi Camat kepada Kasubag Umum ketatalaksanaan dan kepegawaian untuk berkoordinasi dengan BKPSDM terkait dengan kegiatan Diklat						√	√	√	√	√	√		Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	CAMAT
RSK MJ 18	Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan						√	√	√	√	√	√		Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	CAMAT
RSK MJ 19	Melakukan bimtek, sosialisasi melalui website dan media sosial						√	√	√	√	√	√		Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	CAMAT



RK MJ 05	Evaluasi Sumber Daya Manusia yang ada sebelum peaksanaan kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretaris Kecamatan	CAMAT
RSK MJ 20	Penyiapan komponen listrik sesuai kebutuhan				√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	CAMAT
RSK MJ 21	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi				√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kepala Sub.Bag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	CAMAT
RSK MJ 22	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi				√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	CAMAT
RSK MJ 23	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi				√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK (IFNI HANIFAH GANI)	CAMAT
RSK MJ 24	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi				√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	CAMAT
RSK MJ 25	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi				√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	CAMAT
RSK MJ 26	Segera melakukan proses pemilihan penyedia				√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	CAMAT



BerAKHLAK
Berakhlak Baik dengan Rukun Islam dan Rukun Negara
Berakhlak Baik dengan Rukun Islam dan Rukun Negara



RSK MJ 32	Instruksi Camat kepada Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian untuk melakukan penyesuaian kebutuhan anggaran dengan sisa anggaran yang tersedia				√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	CAMAT
RSK MJ 33	Instruksi Camat kepada Kasi PMD untuk melakukan penyesuaian kebutuhan anggaran dengan sisa anggaran yang tersedia				√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasi PMD	CAMAT
RK MJ 07	Monitoring Dan Efisiensi Waktu Penyelesaian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretaris Kecamatan	CAMAT
RSK MJ 34	Menambah anggaran yang di butuhkan							√	√	√				PPTK (HATMAH)	CAMAT
RSK MJ 35	Mengalokasikan/ menyediakan anggaran tambahan kegiatan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik							√	√	√				PPTK (HATMAH)	CAMAT
RSK MJ 36	Instruksi Kepala Dinas kepada Sekretaris dan Kasubbag Kepegawaian beserta Petugas agar cermat dalam melakukan penginputan nilai nominal gaji non ASN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK (HATMAH)	CAMAT



BerAKHLAK
Berakhlak Berkompromi
Berakhlak Berkeadilan



BerAKHLAK
Berakhlak Baik dengan Rukun Islam dan Rukun Negara
Berakhlak Baik dengan Rukun Islam dan Rukun Negara



RK MJ 10	Melakukan Koordinasi dan Evaluasi kegiatan		√	√	√	√		√	√		√			Kasi Pelayanan Umum dan Kasi PMD	CAMAT
RSK MJ 45	Sosialisasi Kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas pengelola bank sampah				√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasi PMD	CAMAT
RSK MJ 46	Penetapan pemeliharaan LPJU berdasarkan skala prioritas				√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK (SURYANI,S.IP)	CAMAT
RSK MJ 47	Rasionalisasi peserta bimtek berdasarkan ketersediaan anggaran				√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasi Pelayanan Umum	CAMAT
RSK MJ 48	1. Optimalisasi data korban bencana agar penyaluran bantuan tepat; 2. Kerjasama dengan masyarakat dan CSR dalam pemberian bantuan bagi korban bencana				√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kasi Trantibum	CAMAT
RSK MJ 49	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh PPKom, PPTK, dan Konsultan Pengawasan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK (DINA MARIANA,SE,MM)	CAMAT
RSK MJ 50	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh PPKom, PPTK, dan Konsultan Pengawasan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK (EDY KASianto.S S.Pd)	CAMAT



RSK MJ 51	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh PPKom, PPTK, dan Konsultan Pengawasan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK (NORJANAH,S.Sos)	CAMAT
				√	√	√	√							
RSK MJ 52	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh PPKom, PPTK, dan Konsultan Pengawasan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK (RULI HAMBRANI,S.Ag)	CAMAT
				√	√	√	√							
RSK MJ 53	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh PPKom, PPTK, dan Konsultan Pengawasan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK (SYAMSUL BAHRI,SE)	CAMAT
				√	√	√	√							
RSK MJ 54	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh PPKom, PPTK, dan Konsultan Pengawasan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PPTK (SURYANI,S.IP)	CAMAT
			√	√	√	√								
RP MJ 04	Menyusun Kembali Prioritas Kegiatan												1. Kasi Pemerintahan; 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa;	CAMAT
RK MJ 11	Monitoring dan evaluasi		√			√			√			√	Sekretaris Camat	CAMAT



RSK MJ 55	Instruksi Camat Kepada Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa agar lebih aktif melakukan koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan	√	√													Kasi PMD	CAMAT
RSK MJ 56	Instruksi Camat Kepada Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa agar lebih aktif melakukan koordinasi dengan KOK Muara Jawa				√	√										Kasi PMD	CAMAT
RSK MJ 57	Instruksi Camat Kepada Kasi PMD Kecamatan dan seluruh Lurah agar segera melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan kegiatan				√	√	√	√	√	√						Kasi PMD dan Lurah	CAMAT
RSK MJ 58	Instruksi Camat kepada Kasi PMD Kecamatan dan seluruh Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan dengan mengoptimalkan anggaran setelah efisiensi				√	√	√	√	√	√						PPTK (Kasi Pelayanan Umum) dan Lurah	CAMAT
RSK MJ 59	Instruksi Camat kepada seluruh Kelurahan untuk mengikuti kegiatan Evaluasi/Lomba Kelurahan	√	√													Kasi PMD	CAMAT
			√	√	√												



BerAKHLAK
Berakhlak Baik dengan Rukun Islam dan Rukun Negara
Berakhlak Baik dengan Rukun Islam dan Rukun Negara



RSK MJ 63	Koordinasi / Rapat kerja dengan Tomas dan Tomag	√			√			√			√				Kasi Trantib	CAMAT
RP MJ 06	1. Instruksi Camat kepada seluruh aparaturnya untuk bekerja sesuai SOP; 2. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan; 3. Peningkatan kualitas SDM melalui bimtek/diklat														Semua Kasi dan Kasubag	CAMAT
RK MJ 14	Melakukan Rapat Kerja dan Monitoring ke Lapangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			Sekretaris Camat	CAMAT
RSK MJ 64	1. Koordinasi dengan Setkab terkait jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat kerja Sekretariat LPTQ Kecamatan Muara Jawa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			Sekretaris Camat dan PPTK (IFNI HANIFAH GANI)	CAMAT
			√	√	√											

Keterangan : (Warna Hijau rencana pelaksanaan) sesuai RTP

(Warna Kuning Realisasi pelaksanaan) bulan pelaksanaan



Tabel
Pelaksanaan Pengendalian Risiko Program dan Kegiatan Eselon III Tahun 2025

Kode Risiko	Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Target Waktu (Rencana Jadwal RTP)	Keterjadian Risiko (Ya/Tidak)	Output kegiatan pengendalian	Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan pengendalian/ Risiko Sisa yang belum dapat dikendalikan	Upaya telah dilakukan dalam penanganan risiko sisa (residual risk).
RP MJ 01	Mengadakan PKS (Pelatihan Kantor Sendiri) terkait pemenuhan dokumen SAKIP pada seluruh Pengawai	Mei s/d Desember	Ya	Dokumen Hasil Kinerja	Kurang tertib dalam pendokumentasian bukti-bukti kinerja	Surat instruksi Camat untuk penyampaian bukti pelaksanaan kinerja
RK MJ 01	Monitoring Rencana Kerja, Laporan Evaluasi Kinerja Masing-masing Kasi dan Kasubbag Disampaikan Tepat Waktu Setiap Bulan	Maret s/d Desember				



BerAKHLAK
Berakhlak Baik dengan Rukun Islam dan Rukun Negara
Berakhlak Baik dengan Rukun Islam dan Rukun Negara



RSK MJ 04	Instruksi Camat kepada Pelaksana kegiatan agar Data Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja disampaikan tepat waktu kepada Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	Januari-Desember	Tidak	-	-	Instruksi Camat Nomor P-2/SET.KEU-M.JAWA/100.1.2/05/2025 Tanggal 5 Mei terkait penyampaian dan pelaporan kinerja
RSK MJ 05	Instruksi Camat kepada Pelaksana kegiatan agar Data Capaian Kinerja disampaikan tepat waktu kepada Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan agar dapat disusun Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember			Evaluasi mandiri penyelenggaraan SPIP belum dilaksanakan secara maksimal	1. Surat Keputusan Camat Muara Jawa Nomor P-008/SET.CMJ.UKK/180.18/01/2025 Tanggal 3 Maret 2025 tentang Pembentukan tim penyelenggaraan SPIP Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 2. BA dan dokumentasi pendampingan KK PM SPIP 2025
RSK MJ 06	Koordinasi dengan Bappeda selaku OPD serta melakukan pendampingan kepada [etugas pengumpul dan penginput data	April - Desember				



RSK MJ 07	Penunjukan personil untuk menghadiri Forum PD	Maret - April	Ya	-	Kegiatan dihadiri tetapi BA tidak tersedia	1. Hasil forum PD dapat diunduh melalui aplikasi Erpjud-NG
RK MJ 02	Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi Laporan Administrasi Keuangan Oleh Atasan Langsung Sebelum Disampaikan	Januari s/d Desember	Tidak		Data dukung dari PPTK tidak lengkap	SOP Pengelolaan APBD
RSK MJ 08	1. Permohonan pergeseran anggaran kas gaji dan tunjangan; 2. Permohonan pergeseran pagu antar rekening gaji dan tunjangan; 3. Permohonan penambahan pagu gaji dan tunjangan	Januari s/d Desember	Ya	BA Rekon	Data dukung dari PPTK tidak lengkap	Rencana permohonan tambahan anggaran gaji dan tunjangan di APBD-P 2025 setelah rekonsiliasi dengan BPKAD



RSK MJ 09	Instruksi Camat kepada Pengurus barang dan pejabat penatausahaan keuangan agar melaksanakan rekonsiliasi data barang dan data keuangan secara rutin	Januari dan Desember				
RSK MJ 10	Instruksi Camat kepada pelaksana kegiatan untuk membuat rekapitulasi/laporan realisasi pembayaran tepat waktu	Januari s/d Desember	Ya		Pelaksana kegiatan belum membuat rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan	Instruksi Camat Nomor P-2/SET.KEU-M.JAWA/100.1.2/05/2025 Tanggal 5 Mei terkait penyampaian dan pelaporan kinerja
RSK MJ 11	Instruksi Camat kepada pelaksana kegiatan untuk membuat rekapitulasi/laporan realisasi pembayaran tepat waktu	Juni				



RK MJ 03	Pengurus Barang Melakukan Pemeriksaan Kesesuaian Dokumen dan Barang Sebelum Dilakukan Pencatatan	Januari s/d Desember				
RSK MJ 12	Pejabat penatausahaan BMD dan Pengurus Barang mengumpulkan data-data RKBMD/RKPBMD dari setiap Kelurahan serta Bagian-bagian di Kecamatan dan melakukan verifikasi atas usulan-usulan tersebut	Januari s/d Desember	Ya	Laporan	Data untuk pembuatan laporan tidak ada	Surat instruksi Camat untuk pengumpulan data-data RKBMD/RKPBMD



RSK MJ 13	Nota Dinas dari Camat Kepada Pelaksana Kegiatan PBJ dan PPKom agar menyampaikan data dan informasi secara lengkap kepada pengurus barang, dan pengurus barang melakukan pencatatan dan pendokumentasian hasil PBJ dengan baik	Mei	Ya	Laporan		
-----------	---	-----	----	---------	--	--



RSK MJ 14	Koordinasi/Pendampingan dengan BPKAD Bidang Aset untuk melakukan penilaian atas nilai BMD Kecamatan Muara Jawa	Januari s/d Desember	Tidak	Laporan		
RSK MJ 15	Nota Dinas Camat kepada pengurus barang agar teliti dan cermat dalam memeriksa barang hasil pengadaan yang dilaksanakan oleh Ppkom ketika barang diserahkan terimakan	Mei	Ya	Laporan		
RK MJ 04	Evaluasi Sumber Daya Manusia yang ada sebelum pelaksanaan kegiatan	Januari s/d Desember				



RSK MJ 16	Instruksi Camat kepada Kasubag Umum ketatalaksanaan dan kepegawaian selaku PPTK untuk segera berproses	TW3 dan TW4	Tidak	Laporan		
RSK MJ 17	Instruksi Camat kepada Kasubag Umum ketatalaksanaan dan kepegawaian untuk berkoordinasi dengan BKPSDM terkait dengan kegiatan Diklat	TW3 dan TW4	Tidak	Laporan		
RSK MJ 18	Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	TW 3 dan 4	Tidak	Laporan		
RSK MJ 19	Melakukan bimtek, sosialisasi melalui website dan media sosial	TW 3 dan 4	Tidak	Laporan		
RK MJ 05	Evaluasi Sumber Daya Manusia yang ada sebelum pelaksanaan kegiatan	Januari s/d Agustus , Oktober				
RSK MJ 20	Penyiapan komponen listrik sesuai kebutuhan	TW 2, TW 3, TW 4	Tidak	Laporan		



RSK MJ 21	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	TW 2, TW 3, TW 4	Tidak	Laporan		
RSK MJ 22	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	TW 2, TW 3, TW 4	Tidak	Laporan		
RSK MJ 23	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	TW 2, TW 3, TW 4	Ya	Laporan	Data untuk pembuatan laporan tidak ada	Evaluasi kembali ke masing-masing pelaksana
RSK MJ 24	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	TW 2, TW 3, TW 4	Tidak	Laporan		



RSK MJ 25	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	TW 2, TW 3, TW 4	Tidak	Laporan		
RSK MJ 26	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	TW 2, TW 3, TW 4	Tidak	Laporan		
RSK MJ 27	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	TW 2, TW 3, TW 4	Tidak	Laporan		
RSK MJ 28	Segera melakukan proses pemilihan penyedia setelah DPPA selesai asistensi	TW 2, TW 3, TW 4	Tidak	Laporan		



BerAKHLAK
Berakhlak Baik dengan Rukun Islam dan Rukun Negara
Berakhlak Baik dengan Rukun Islam dan Rukun Negara



BerAKHLAK
Berorientasi Penguatan Akademik, Keagamaan, Sosial, dan Lingkungan
Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan



RSK MJ 35	Mengalokasikan/ menyediakan anggaran tambahan kegiatan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	TW 3	Ya	Laporan	Rekap dan data dari PPTK dan Bendahara belum lengkap	Evaluasi kembali ke masing- masing pelaksana
RSK MJ 36	Instruksi Kepala Dinas kepada Sekretaris dan Kasubbag Kepegawaian beserta Petugas agar cermat dalam melakukan penginputan nilai nominal gaji non ASN	Januari s/d Desember	Ya	Laporan	Rekap dan data dari PPTK dan Bendahara belum lengkap	Evaluasi kembali ke masing- masing pelaksana
RK MJ 08	Membuat Lembar Control Penjagaan Perawatan Aset	Maret, April, Mei, Juli s/d Oktober				
RSK MJ 37	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan	April - Desember	Ya	Laporan	Rekap dan data dari PPTK dan Bendahara belum lengkap	Evaluasi kembali ke masing- masing pelaksana



RSK MJ 38	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan	April - Desember	Ya	Laporan	Rekap dan data dari PPTK dan Bendahara belum lengkap	Evaluasi kembali ke masing-masing pelaksana
RSK MJ 39	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan	April - Desember	Ya	Laporan	Rekap dan data dari PPTK dan Bendahara belum lengkap	Evaluasi kembali ke masing-masing pelaksana
RSK MJ 40	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan	April - Desember	Ya	Laporan	Rekap dan data dari PPTK dan Bendahara belum lengkap	Evaluasi kembali ke masing-masing pelaksana



RSK MJ 41	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan Aset Tetap lainnya (LPJU) agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan Aset Tetap lainnya (LPJU)	April - Desember	Ya	Laporan	Rekap dan data dari PPTK dan Bendahara belum lengkap	Evaluasi kembali ke masing-masing pelaksana
RSK MJ 42	Instruksi Camat kepada Petugas pelaksana pemeliharaan kendaraan agar menyusun jadwal dan rencana aksi pemeliharaan kendaraan	April - Desember				



RP MJ 02	Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	April -s/d Juni				
RP MJ 03	Verifikasi ulang data dan informasi yang ada	Mei s/d Desember				
RK MJ 09	Mengadakan Koordinasi dan Rapat Kerja	Maret, Juni, s/d Oktober				
RSK MJ 43	Meningkatkan koordinasi antara kecamatan dengan instansi vertikal	Maret, Juni, s/d Oktober				



RSK MJ 44	Intruksi camat kepada Pelaksana Kegiatan untuk memilih belanja-belanja yang prioritas	Februari-Maret	Ya	Laporan	Data untuk pembuatan laporan tidak ada	Evaluasi kembali ke masing-masing pelaksana
RK MJ 10	Melakukan Koordinasi dan Evaluasi kegiatan	Pebruai s/d Mei, Juli, Agustus, Oktober	Ya	Laporan	Data untuk membuat laporan tidak ada	Evaluasi kembali masalah pelaporan
RSK MJ 45	Sosialisasi Kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas pengelola bank sampah	April sd Desember				
RSK MJ 46	Penetapan pemeliharaan LPJU berdasarkan skala prioritas	April sd Desember	Ya	Laporan	Rekap dan data dari setiap Kasi belum lengkap	Evaluasi kembali ke masing-masing pelaksana



RSK MJ 47	Rasionalisasi peserta bimtek berdasarkan ketersediaan anggaran	April sd Desember	Ya	Laporan	Keterbatasan Anggaran	Evaluasi kembali masalah pelaporan
RSK MJ 48	1. Optimalisasi data korban bencana agar penyaluran bantuan tepat; 2. Kerjasama dengan masyarakat dan CSR dalam pemberian bantuan bagi korban bencana	April sd Desember	Ya	Laporan	Tidak ada bencana/Data dan estimasi kerugian akibat bencana	Koordinasi dan evaluasi kepada Tim penanganan Bencana
RSK MJ 49	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh PPKom, PPTK, dan Konsultan Pengawasan	Februari - Desember				
RSK MJ 50	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh PPKom, PPTK, dan Konsultan Pengawasan	Februari - Desember				
RSK MJ 51	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh PPKom, PPTK, dan Konsultan Pengawasan	Februari - Desember	Ya	Laporan	Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai RAB	Evaluasi kembali masalah pelaporan
RSK MJ 52	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh PPKom, PPTK, dan Konsultan Pengawasan	Februari - Desember	Ya	Laporan	Data yang diperlukan kadang belum ada dan tidak lengkap	Koordinasi dan evaluasi kepada pelaksana



BerAKHLAK
Berakhlak Baik dengan Rukun Islam dan Rukun Negara
Berakhlak Baik dengan Rukun Islam dan Rukun Negara



RSK MJ 56	Instruksi Camat Kepada Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa agar lebih aktif melakukan koordinasi dengan KOK Muara Jawa	April-Mei				
RSK MJ 57	Instruksi Camat Kepada Kasi PMD Kecamatan dan seluruh Lurah agar segera melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan kegiatan	TW 2 dan TW 3				
RSK MJ 58	Instruksi Camat kepada Kasi PMD Kecamatan dan seluruh Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan dengan mengoptimalkan anggaran setelah efisiensi	TW 2 dan TW 3	Ya	Laporan	Data untuk membuat laporan tidak ada	Evaluasi kembali masalah pelaporan
RSK MJ 59	Instruksi Camat kepada seluruh Kelurahan untuk mengikuti kegiatan Evaluasi/Lomba Kelurahan	Januari-Februari				



RSK MJ 60	1. Penunjukan Kelurahan yang siap mewakili; 2. Optimalisasi anggaran yang tersedia setelah proses efisiensi	Maret-April				
RK MJ 12	Melakukan Rapat Kerja dan Monitoring ke Lapangan	Mei, Juli, Oktober				
RSK MJ 61	1. Instruksi Camat Kepada PPTK agar proaktif melakukan koordinasi kegiatan; 2. Intruksi Camat kepada Lurah untuk segera melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program pembangunan berbasis RT di setiap Kelurahan	Mei, Juli, Oktober	Ya	Laporan	Rekap dan data dari PPTK dan Bendahara belum lengkap	Evaluasi kembali ke masing-masing pelaksana
RSK MJ 62	Instruksi Camat Kepada Kasi Trantib agar proaktif melakukan koordinasi kegiatan	Mei, Juli, Oktober	Ya	Laporan	Data Kepengurusan tidak ada dan jadwal kegiatan belum ditentukan	Koordinasi dan evaluasi kepada pengurus dan pelaksana



RP MJ 05	Melakukan Kegiatan secara Terpadu dengan Polsek, Koramil, UPT Dinas/Badan, dan Tokoh agama/masyarakat	Per Triwulan				
RK MJ 13	Koordinasi lintas sektoral dan pembentukan tim kerja bersama	TW 1, TW 2, TW 3, TW 4				



RSK MJ 63	Koordinasi / Rapat kerja dengan Tomas dan Tomag	TW 1, TW 2, TW 3, TW 4	Ya	Laporan	Data dan Dokumentasi Kegiatan	Koordinasidan evaluasi kepada pelaksana
RP MJ 06	1. Instruksi Camat kepada seluruh aparatur untuk bekerja sesuai SOP; 2. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan; 3. Peningkatan kualitas SDM melalui bimtek/diklat	1 Tahun				
RK MJ 14	Melakukan Rapat Kerja dan Monitoring ke Lapangan	Jan sd November				



RSK MJ 64	1. Koordinasi dengan Setkab terkait jadwal pelaksanaan kegiatan; 2. Rapat kerja Sekretariat LPTQ Kecamatan Muara Jawa	Jan sd November	Ya	Laporan	Data untuk pembuatan laporan tidak ada	Evaluasi kembali ke masing-masing pelaksana
-----------	--	-----------------	----	---------	--	---



Tabel
Capaian Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	REALISASI FISIK		PROSEN TASE SE FISIK	REALISASI KEUANGAN	PROSEN TASE KEUA NGAN
1	2	3	4		5	6		7	8	9
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Nilai	24.170.301.299	0	Nilai	-	9.072.677.542	37,54
7.01.01 .2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36	dokumen	605.000.000	30	dokumen	83,3	3.123.900	0,5
7.01.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	14	laporan	15.449.312.901	7	laporan	50,0	7.319.524.759	47,4
7.01.01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	1017	unit	280.200.000	5	unit	0,5	23.000.000	8,2
7.01.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian	74	Orang	705.511.992	0	Orang	0,0	-	0,0
7.01.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11	jenis	1.557.620.000	7	jenis	63,6	43.951.000	2,8
7.01.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	80	Persen	772.400.000	0	Persen	0,0	-	0,0



Kecamatan Muara Jawa
Laporan Unit Pengelolaan Risiko Triwulan II Tahun 2025

7.01.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	bulan	3.607.306.406	5	bulan	41,7	1.579.605.915	43,8
7.01.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	230	unit	1.192.950.000	5	unit	2,2	103.471.968	8,7
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	85	Persen	40.359.650.000	0	Persen	-	4.201.383.843	37,54
		Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	87,5	Persen		100	Persen			
7.01.02 .2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	Kegiatan	450.000.000	0	Kegiatan	0,0	-	0,0
7.01.02 .2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2	Kegiatan	39.909.650.000	0	Kegiatan	0,0	4.201.383.843	10,5
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	Persen	21.987.000.000	0	Persen	-	2.760.151.950	12,55
7.01.03 .2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	25	Kegiatan	7.930.000.000	5	Kegiatan	20,0	83.751.950	1,1
7.01.03 .2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	348	Lembaga	14.057.000.000	217	Lembaga	62,4	2.676.400.000	19,0



7.01.03	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100	Persen	175.000.000	0	Persen	-	-	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Kegiatan	175.000.000	0	Kegiatan	0,0	-	0,0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	612.701.502	100	Persen	100,00	-	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1	Kegiatan	612.701.502	1	Kegiatan	100,0	-	0,0
JUMLAH					87.304.652.801				16.034.213.335	



BAB VII PENUTUP

Demikian Laporan Pengelolaan Risiko UPR Eselon III Camat Muara Jawa Triwulan II Tahun 2025 disusun dan sampaikan sebagai bahan masukan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Urusan (Kecamatan dan Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota) yang dilaksanakan pada (Perangkat Daerah).



Penanggungjawab UPR Esselon III

MUHAMMAD RAMLI, S.E., M.M.

Pembina, IV/a

NIP 197506042000121003



Lampiran Laporan Pengelolaan Risiko Eselon IV

Daftar Dokumen Hasil Pelaksanaan RTP Risiko

Kode Risiko	Nama Dokumen Pelaksanaan RTP	Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)
RP MJ 01	Input RUP	1. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan; 2. Kasubag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
RK MJ 01		Sekretaris Camat
RSK MJ 01	1. Surat Keputusan Camat Muara Jawa Nomor P-008/SET.CMJ.UKK/180.18/01/2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Tim Penyusunan Renja Tahun 2026 2. SS TS Kasi dan PPTK atas perubahan RKPD 2025	Kasubag Penyusunan Program dan keuangan & PPTK
RSK MJ 02	Rekapitulasi hasil entry RKAP setelah efisiensi anggaran per 10 Maret 2025	Kasubag Penyusunan Program dan Camat
RSK MJ 03		Kasubag Penyusunan Program dan Camat
RSK MJ 04	1. Instruksi Camat Muara Jawa Nomor P. 220.1/CMJ/800/I/20245 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Pengumpulan Hasil Kinerja Tahun 2024 beserta bukti dukungannya 2. Instruksi Camat Nomor P-2/SET.KEU-M.JAWA/100.1.2/05/2025 Tanggal 5 Mei terkait penyampaian dan pelaporan kinerja	Kasubag Penyusunan Program dan keuangan & Pengampu Kegiatan/Subkegiatan/Paket pekerjaan
RSK MJ 05	1. Surat Keputusan Camat Muara Jawa Nomor P-008/SET.CMJ.UKK/180.18/01/2025 Tanggal 3 Maret 2025 tentang Pembentukan tim penyelenggaraan SPIP Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 2. BA dan KK PM SPIP 2025	Kasubag Penyusunan Program dan keuangan & Pengampu Kegiatan/Subkegiatan/Paket pekerjaan
RSK MJ 06		Sekretaris Camat
RSK MJ 07		Kasi PMD dan Kasubag Penyusunan Program & Keuangan
RK MJ 02	Laporan 7 Bulan April - juni	Sekretaris Camat
RSK MJ 08	1. Hasil rekon belanja wajib mengikat 2025 dan 2026	Kasubag Penyusunan Program dan keuangan
RSK MJ 09		Sekretaris, dan Kasubag Penyusunan Program dan keuangan
RSK MJ 10	Laporan 7 Bulan April – Juni ; Inputan e-pantau April - Juni	Sekretaris, dan Kasubag Penyusunan Program dan keuangan
RSK MJ 11		Sekretaris, dan Kasubag Penyusunan Program dan keuangan
RK MJ 03	SK Pengelola Barang Milik Daerah	Sekretaris Camat



BerAKHLAK
Berakhlakul Pekayonon, Numbudon komputon
Nopomona Layol Adopon koloponon



BerAKHLAK
Berakhlakul Karif, Berakhlakul Kamil, Berakhlakul Kaffah
Berakhlakul Karif, Berakhlakul Kamil, Berakhlakul Kaffah



Kecamatan Muara Jawa
Laporan Unit Pengelolaan Risiko Triwulan II Tahun 2025

RSK MJ 55		Kasi PMD
RSK MJ 56		Kasi PMD
RSK MJ 57		Kasi PMD dan Lurah
RSK MJ 58	Inputan e-pantau	PPTK (Kasi Pelayanan Umum) dan Lurah
RSK MJ 59		Kasi PMD
RSK MJ 60		Kasi PMD
RK MJ 12		Sekretaris Camat
RSK MJ 61	PERNYATAAN, SP	PPTK (Hatmah,S.IP) & Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan & Lurah
RSK MJ 62	Inputan e-pantau	Kasi Trantib
RP MJ 05		Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
RK MJ 13		Sekretaris Camat
RSK MJ 63	Inputan e-pantau	Kasi Trantib
RP MJ 06		Semua Kasi dan Kasubag
RK MJ 14		Sekretaris Camat
RSK MJ 64	Kegiatan MTQ TK Kecamatan telah selesai (Kel. Tama Pole)	Sekretaris Camat dan PPTK (IFNI HANIFAH GANI)